



PROFIL Gender dan Anak

Kabupaten Sumba Barat Daya 2025



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Barat Daya

DP3AP2KB Kabupaten Sumba Barat Daya



PROFIL Gender dan Anak

Kabupaten Sumba Barat Daya 2025



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Barat Daya

PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA 2025

Ukuran Buku: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: xx + 112 halaman

Penyusun Naskah:

BPS Kabupaten Sumba Barat Daya

Penyunting:

- BPS Kabupaten Sumba Barat Daya
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Barat Daya

Pembuat Kover:

BPS Kabupaten Sumba Barat Daya

Penerbit:

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Barat Daya

Sumber Ilustrasi:

<https://www.freepik.com>

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat Daya dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Barat Daya.

TIM PENYUSUN

Profil Gender dan Anak Kabupaten Sumba Barat Daya 2025

Pengarah

Octavina TS. Samani
Joke Ratna Christina

Penanggung Jawab

Octavina TS. Samani
Joke Ratna Christina

Penyunting

Silas Ino Bily
Yesdi Christian Calvin
Bernadeta Dambung
Eko Wahyono
Paulina Nani

Pengolah Data dan Penulis Naskah

I Kadek Wijayantara
Jofri Ardo Tiganna Sembiring
Kadek Dwi Mahardika
Maria Jevania Tpoy
R.Bg. Miko Oktavio Wijaya
Vania Putri Ardiningrum

Penata Letak

Silas Ino Bily
Yesdi Christian Calvin

KONTRIBUTOR DATA

1. Badan Pusat Statistik
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Badan Informasi Geospasial
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Barat Daya
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat Daya
8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumba Barat Daya
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya
11. Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya
12. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Barat Daya
13. Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya
14. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sumba Barat Daya

Kata Pengantar

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar kewenangan Kabupaten/Kota.

Penyusunan Profil Gender dan Anak Tahun 2025 merupakan Kerjasama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Daya.



Profil Gender dan Anak menyediakan informasi Profil Perempuan dalam bidang Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Hukum dan Sosial Budaya, Politik dan Pengambilan Keputusan serta Profil Anak. Data yang disajikan bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dalam Profil Gender dan Anak Tahun 2025 ini juga dipublikasikan program kegiatan yang telah diimplementasikan oleh DP3AP2KB Kabupaten Sumba Barat Daya selama Tahun 2024.

Kami menyadari mungkin terdapat banyak kekurangan dalam publikasi ini, untuk itu saran dan perbaikan demi penyempurnaan di tahun yang akan datang sangat kami harapkan.

Akhirnya penghargaan dan terimakasih, Kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan informasi, bantuan sampai terbitnya publikasi Profil Gender dan Anak Kabupaten Sumba Barat Daya 2025.

Tambolaka, September 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sumba Barat Daya



drh. Octavina TS. Samani
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 196710101998032009

Daftar Isi

Profil Gender dan Anak Kabupaten Sumba Barat Daya 2025

Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar gambar.....	xiii
Bab I. Gambaran Umum	1
A. Kondisi Geografis dan Pemerintahan	3
B. Kondisi Kependudukan	4
C. Indeks Pembangunan Gender	8
D. Indeks Ketimpangan Gender	9
E. Indeks Pemberdayaan Gender	15
Bab II. Bidang Kesehatan.....	19
A. Gambaran Kondisi Kesehatan Penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya	21
B. Kesehatan Ibu Hamil	23
C. Peningkatan Persalinan yang Aman Bagi Ibu	27
D. Penggunaan Alat Kontrasepsi	29
E. Gambaran Kesehatan Anak	30
Bab III. Bidang Pendidikan	45
A. Gambaran Pendidikan Penduduk	47
B. Gambaran Pendidikan Anak.....	52
Bab IV. Bidang Ekonomi dan Tenaga Kerja	63
A. Ketenagakerjaan	65
B. Aktivitas Ekonomi.....	70
Bab V. Hukum Politik dan Pengambilan Keputusan.....	77
A. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	79
B. Politik dan Pengambilan Keputusan.....	81
Bab VI. Bidang Sosial	89
A. Penduduk Lanjut Usia.....	91
B. Bantuan Sosial Bagi Anak.....	92
Bab VII. Kegiatan Dan Praktek Baik Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.	95
Penutup.....	107
LAMPIRAN	111

DP3AP2KB Kabupaten Sumba Barat Daya

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024	4
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021-2024	5
Tabel 2.2 Jumlah dan Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Imunisasi Tetanus Difteri (TD) di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024	25
Tabel 2.5 Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat akan peserta KB Aktif, 2024	30
Tabel 3.1. Jumlah Satuan Pendidikan PAUD di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024	48
Tabel 4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut jenis kelamin, 2021-2024	69
Tabel 4.2. Penduduk Bekerja Seminggu yang Lalu menurut Status Kegiatan, Agustus 2024	71
Tabel 4.3. Jumlah Manager dan Karyawan menurut Jenis Kelamin dan Jenis Koperasi, Desember 2024	74
Tabel 4.4. Jumlah Pengurus dan Pengawas menurut Jenis Kelamin dan Jenis Koperasi, Desember 2024	74
Tabel 7.1. Lokasi Sosialisasi Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak melalui Upaya Pencegaha Stunting di Sumba Barat Daya, 2024	99

DP3AP2KB Kabupaten Sumba Barat Daya

Daftar gambar

Gambar 1.1 Piramida Penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024	5
Gambar 1.2 Luas Wilayah ¹ dan Kepadatan Penduduk ² menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024.....	7
Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021-2024	8
Gambar 1.4 Indeks Pembangunan Gender menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024	9
Gambar 1.5 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021-2024	10
Gambar 1.6 Capaian MTF dan MHPK20 di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021-2024	11
Gambar 1.7 Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Sumba Barat Daya yang Memiliki Keterwakilan di Legislatif, 2021-2024	12
Gambar 1.8 Persentase Penduduk Berpendidikan Minimal SMA menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021-2024.....	13
Gambar 1.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021-2024	14
Gambar 1.10 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021 - 2024	15
Gambar 1.12 Persentase Penduduk yang Bekerja sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021-2024	16
Gambar 1.13 Sumbangan dalam Pendapatan Kerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021-2024... ..	17

Gambar 2.1 Persentase Penduduk Sumba Barat Daya yang Memiliki Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir, 2024	21
Gambar 2.2 Persentase Penduduk Sumba Barat Daya yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin, 2024.....	23
Gambar 2.3 Persentase Ibu Hamil yang Melakukan Kunjungan K1, K4 dan K6 di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024	24
Gambar 2.4 Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024	26
Gambar 2.5 Persentase Perempuan usia 15-49 Tahun menurut Penolong Kelahiran dan Tempat Melahirkan di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024.....	27
Gambar 2.6 Persentase penduduk berumur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI dan Rata-Rata Lama Pemberian ASI	28
Gambar 2.7 Persentase Akseptor KB Menurut Metode Kontrasepsi yang Digunakan, Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024...	29
Gambar 2.8 Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2020-2024.....	31
Gambar 2.9 Jumlah Kematian Balita di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2020-2024	32
Gambar 2.10 Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2020-2024.....	33
Gambar 2.11 Persentase Imunisasi Balita Menurut Jenis Imunisasi, 2020-2024.....	34
Gambar 2.12 Persentase Imunisasi Lengkap di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2023.....	34
Gambar 2.13 Jumlah Balita <i>Stunting</i> di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021 - 2024	35
Gambar 2.14 Jumlah balita dengan gizi buruk di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021-2024.....	36

Gambar 2.15 Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran, 2024	37
Gambar 2.16 Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Jenis Kelamin, 2024	37
Gambar 2.17 Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Kelompok Pengeluaran, 2024	38
Gambar 2.18 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan, 2024	39
Gambar 2.19 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan dan Menurut Jenis Kelamin, 2024	39
Gambar 2. 20 Perempuan Pernah Kawin (PPK) Umur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dengan Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan, 2024	41
Gambar 2.21 Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) Umur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dengan Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Menurut Kelompok Pengeluaran, 2024	41
Gambar 2.22 Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) Umur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dengan Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Menurut Kelompok Pengeluaran, 2024	42
Gambar 2.23 Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) Umur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) di Fasilitas Kesehatan, 2024	42
Gambar 2.24 Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) Umur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) di Fasilitas Kesehatan Menurut Kelompok Pengeluaran, 2024	43
Gambar 2.25 Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) Umur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup	

(ALH) di Fasilitas Kesehatan Menurut Pendidikan Tertinggi, 2024	43
Gambar 3.1 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2022-2024	49
Gambar 3.2. Persentase Buta Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2023	50
Gambar 3.3. Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun ke Atas menurut Status Pendidikan, 2020-2024	51
Gambar 3.4. Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan, 2020-2024	52
Gambar 3.5. APS Anak menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024.....	53
Gambar 3.6. APS menurut Kelompok Umur dan Klasifikasi Wilayah di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun, 2024	54
Gambar 3.7. APK Jenjang Pendidikan menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024.....	55
Gambar 3.8. APK Jenjang Pendidikan menurut Wilayah di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024.....	56
Gambar 3.9. APM Jenjang Pendidikan menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024.....	57
Gambar 3.10. APM Jenjang Pendidikan menurut Wilayah di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024.....	58
Gambar 3.11. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2024	59
Gambar 3.12. Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir di Kabupaten Sumba Barat Daya	60

Gambar 3.13. Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya 2024	61
Gambar 3.14. Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Wilayah di Kabupaten Sumba Barat Daya 2024	61
Gambar 4.1. Konsep Ketenagakerjaan menurut <i>International Conference of Labour Staticians</i> (ICLS) 13	65
Gambar 4.2. Jumlah Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin, 2021-2024.....	66
Gambar 4.3. Jumlah Angkatan dan Bukan Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin, 2021-2024.....	66
Gambar 4.4. Jumlah Penduduk Bekerja menurut Jenis Kelamin, 2021-2024.....	67
Gambar 4.5. Jumlah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021-2024	68
Gambar 4.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2021-2024 ...	69
Gambar 4.7. Pekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha Utama, Agustus 2024	70
Gambar 4.8. Jumlah Anggota Koperasi menurut Jenis Koperasi, Desember 2024.....	72
Gambar 4.9. Jumlah Anggota Koperasi menurut Jenis Kelamin dan Jenis Koperasi, Desember 2024	73
Gambar 5.1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaporkan, 2024.....	79
Gambar 5.2. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan, 2024.....	80
Gambar 5.3. Proporsi Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya menurut Jenis Kelamin, 2024	81

Gambar 5.4. Distribusi PNS menurut Golongan dan Jenis Kelamin, 2024.....	82
Gambar 5.5. Distribusi PNS Golongan IV menurut Subkelasnya, 2024.....	83
Gambar 5.6. Distribusi PNS Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin, 2024.....	84
Gambar 5.7. Distribusi PNS menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2024	85
Gambar 5.8. Distribusi PPPK menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2024	86
Gambar 5.9. Distribusi PPPK menurut Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin, 2024	87
Gambar 6.1. Jumlah Penduduk Usia 60 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin, 2023-2024.....	91
Gambar 6.2. Jumlah Lansia Terlantar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2024	92
Gambar 6.3. Jumlah Anak Penerima PKH Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2024	93
Gambar 7.1. Sosialisasi Melindungi Anak dari Kekerasan dan Pembentukan Forum Anak Desa	97
Gambar 7.2. Sosialisasi pencegahan stunting dan pemberian sembako kepada keluarga beresiko Stunting	100
Gambar 7.3. Advokasi Kebijakan dan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender, serta Pembentukan Gender Vocal Point di Perangkat Daerah	101
Gambar 7.4. Pengaduan Langsung Ke kantor UPTD PPA	104
Gambar 7.5. Pendampingan Hukum.....	104

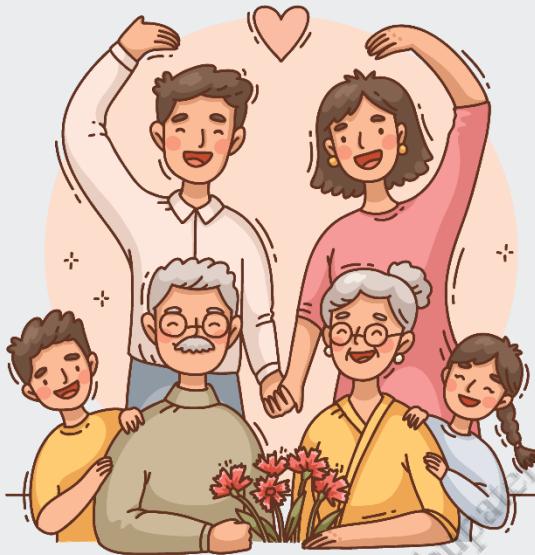
Gambar 7.6. Penampungan Sementara di Rumah Perlindungan, Bersama Lembaga Perlindungan Saksi & Korban (LPSK) dan Pendampingan Medis.....	105
Gambar 7.7. Pendampingan Psikologis oleh Psikolog dan Mediasi	105

DP3AP2KB Kabupaten Sumba Barat Daya

BAB I Gambaran Umum



Infografik



JUMLAH PENDUDUK

Pada tahun 2024, jumlah penduduk di Kabupaten Sumba Barat Daya adalah

328.771 Jiwa

dengan perbandingan

 51,15%
LAKI - LAKI

 48,85%
PEREMPUAN

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

TUJUAN Mengukur Kesetaraan Capaian Pembangunan Manusia antara perempuan dan laki - laki



Mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir. Artinya akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan standar hidup hampir setara

INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)

TUJUAN Mengukur Ketimpangan Pembangunan Manusia antara perempuan dan laki - laki



Terjadi tren peningkatan dalam empat tahun terakhir. Artinya, ketimpangan masih cukup besar terutama pada aspek strategis seperti pemberdayaan perempuan

DP3AP2KB Kabupaten Sumba Barat Daya

A. Kondisi Geografis dan Pemerintahan

Kondisi Geografis

Sumba Barat Daya adalah salah satu kabupaten di Pulau Sumba yang terbentuk pada tahun 2007 dan merupakan hasil pemekaran dari sebagian wilayah Kabupaten Sumba Barat. Kabupaten Sumba Barat Daya berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang secara geografis terletak di ujung barat Pulau Sumba. Jika dilihat berdasarkan letak astronomisnya, Kabupaten Sumba Barat Daya berada pada titik $9^{\circ}20' - 9^{\circ}40'$ LS dan $118^{\circ}45' - 119^{\circ}10'$ BT. Wilayah utara dan barat Kabupaten Sumba Barat Daya berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Sementara itu wilayah selatan dan timur berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat.

Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki luas wilayah sebesar $1.383,31\text{ km}^2$ yang terbagi ke dalam 11 kecamatan. Topografi wilayah di kabupaten ini didominasi oleh dataran bergelombang dengan beberapa dataran rendah di sekitar wilayah pesisir. Struktur dataran di Kabupaten Sumba Barat Daya sebagian besar adalah jenis dataran tanah yang banyak mengandung batuan kapur. Jika dilihat berdasarkan ketinggiannya, Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki ketinggian wilayah yang berkisar antara 0-600 mdpl, di mana daerah yang lebih tinggi berada di bagian tengah dan utara dari kabupaten ini.

Pemerintahan

Secara administratif, Kabupaten Sumba Barat Daya terdiri dari 11 kecamatan. Pusat pemerintahan dan pelayanan publik yang ada di wilayah ini berada di Kecamatan Kota Tambolaka. Dari 11 kecamatan yang ada, terdapat sebanyak 173 desa dan 2 kelurahan. Dua kelurahan tersebut adalah Kelurahan Wee Tobula dan Kelurahan Langga Lero yang keduanya terletak di Kecamatan Kota Tambolaka. Rincian jumlah desa/kelurahan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

Kecamatan (1)	Jumlah Desa/Kelurahan (2)
Kodi Bangedo	15
Kodi Balaghar	14
Kodi	19
Kodi Utara	21
Wewewa Selatan	14
Wewewa Barat	20
Wewewa Timur	19
Wewewa Tengah	20
Wewewa Utara	12
Loura	11
Kota Tambolaka	10
Sumba Barat Daya	175

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya

B. Kondisi Kependudukan

1. Komposisi Penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya

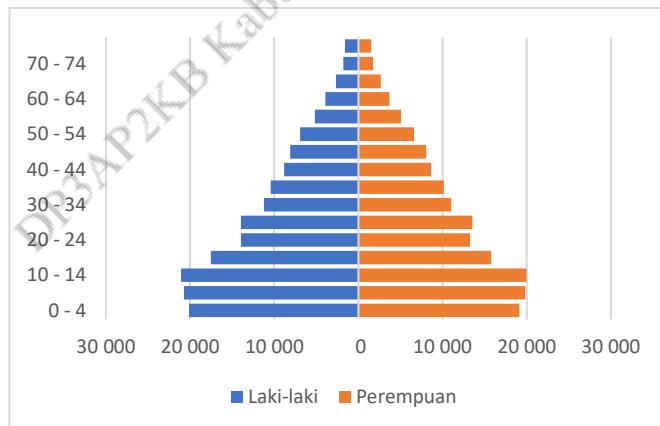
Jumlah penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, hingga mencapai 328.771 jiwa pada tahun 2024, yang terdiri atas 168.155 laki-laki dan 160.616 perempuan. Pertumbuhan ini mencerminkan dinamika demografis yang dapat dipengaruhi oleh faktor kelahiran, migrasi, dan penurunan angka kematian. Berikut ini merupakan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Sumba Barat Daya dari tahun 2021 sampai dengan 2024.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021-2024

Kabupaten	Jumlah Penduduk			
	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumba Barat Daya	308.809	315.427	322.073	328.771

Sumber: Badan Pusat Statistik

Jika ditinjau berdasarkan klasifikasi umurnya, proporsi penduduk usia non produktif (penduduk berumur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) hampir setara dengan penduduk usia produktif (penduduk berusia 15-64 tahun). Pada tahun 2024, terdapat 40,1 persen penduduk di Kabupaten Sumba Barat Daya yang masuk ke dalam kelompok penduduk usia non produktif. Jika dilihat secara lebih rinci berdasarkan kelompok umurnya, penduduk kelompok umur 10-14 tahun merupakan kelompok dengan jumlah penduduk yang terbanyak. Sebaran jumlah penduduk di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2024 yang dirinci berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada piramida penduduk di bawah ini.

Gambar 1.1 Piramida Penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik

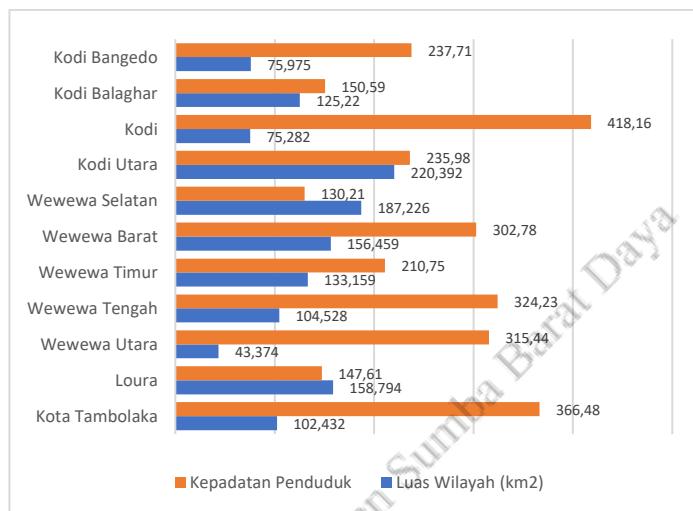
Berdasarkan bentuk piramida penduduk di atas, dapat dilihat bahwa piramida penduduk tersebut berbentuk ekspansif. Suatu wilayah dengan bentuk piramida penduduk ekspansif dapat diartikan sebagai wilayah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi dan komposisi penduduk yang didominasi oleh penduduk usia muda. Dasar piramida yang relatif lebih lebar menunjukkan jumlah penduduk belum produktif/anak-anak (penduduk umur 0-14 tahun) yang tergolong banyak di Kabupaten Sumba Barat Daya. Banyaknya anak-anak juga mengindikasikan tingginya angka kelahiran di suatu wilayah. Tingginya jumlah penduduk belum produktif ini dapat juga diartikan sebagai suatu kondisi dimana angka ketergantungan yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya masih tergolong tinggi. Hal ini didukung pula oleh data Angka Beban Ketergantungan dari BPS, dimana besarnya angka tersebut di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2022 adalah sebesar 69,81 persen dan merupakan yang tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Angka tersebut dapat diartikan sebagai kondisi ketika setiap 100 orang penduduk usia produktif di Sumba Barat Daya harus menanggung sekitar 70 orang penduduk usia non produktif.

Jika dilihat pada kelompok umur di atasnya, jumlah penduduk usia produktif (penduduk umur 15-64 tahun) terus mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya usia. Hal yang sama juga terjadi pada penduduk tidak produktif/lansia (penduduk umur 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk lansia di Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dikatakan sangat kecil, dimana hanya terdapat sebanyak 3,65 persen penduduk lansia pada tahun 2024. Hal ini bisa menjadi salah satu indikasi Angka Harapan Hidup (AHH) yang belum terlalu tinggi. Data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian AHH di Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebesar 69,20, dimana angka tersebut berada di bawah rata-rata nasional dengan capaian AHH sebesar 72,39.

Persebaran dan Kepadatan Penduduk Sumba Barat Daya

Dengan luas wilayah sebesar 1.382,84 km² dan jumlah penduduk sebanyak 328.771 jiwa, didapatkan angka kepadatan penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 237,75 jiwa/km² pada tahun 2024. Angka tersebut berarti bahwa setiap 1 km² wilayah dihuni oleh sekitar 238 jiwa. Kepadatan penduduk yang ada di setiap kecamatan juga memiliki variasi yang cukup signifikan.

Gambar 1.2 Luas Wilayah¹ dan Kepadatan Penduduk² menurut Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: ¹ Badan Informasi Geospasial, ² Badan Pusat Statistik

Berdasarkan gambar di atas, sebaran kepadatan penduduk antar kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Kecamatan Kodi merupakan wilayah yang paling padat dengan kepadatan penduduk sebesar 418,16 jiwa/km². Hal ini karena wilayah Kecamatan Kodi yang tidak seluas kecamatan lain namun jumlah penduduknya merupakan salah satu yang tertinggi. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi selanjutnya yaitu Kecamatan Kota Tambolaka, yang merupakan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sementara itu kecamatan dengan angka kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Wewewa Selatan, yaitu sebesar 130,21 jiwa/km².

Perbandingan antara luas wilayah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan hubungan yang tidak selalu sebanding. Kecamatan Kodi Utara, misalnya, merupakan kecamatan terluas dengan luas 220,39 km², namun memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah dibanding kecamatan-kecamatan yang luas wilayahnya lebih kecil seperti Kodi, Kodi Bangedo, dan Wewewa Utara. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Kodi Utara masih relatif jarang penduduk dan memiliki potensi ruang yang cukup untuk pengembangan. Sebaliknya, Kecamatan

Wewewa Utara yang merupakan kecamatan terkecil justru memiliki tingkat pendapatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan Kodi Utara.

C. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu angka yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam capaian pembangunan manusia. IPG merupakan salah satu indikator yang dihasilkan oleh BPS dan dihitung berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibedakan menurut jenis kelamin. Perhitungan IPG dilakukan dengan membandingkan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG sendiri berkisar antara 0-100, dimana angka IPG yang semakin mendekati 100 menunjukkan kesetaraan gender semakin baik.

IPG disusun berdasarkan tiga dimensi yang meliputi dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi standar hidup layak. Dimensi kesehatan diukur dari angka harapan hidup saat lahir. Adapun dimensi pendidikan dihitung dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Sementara itu dimensi standar hidup layak diukur berdasarkan pendapatan per kapita.

Gambar 1.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021-2024

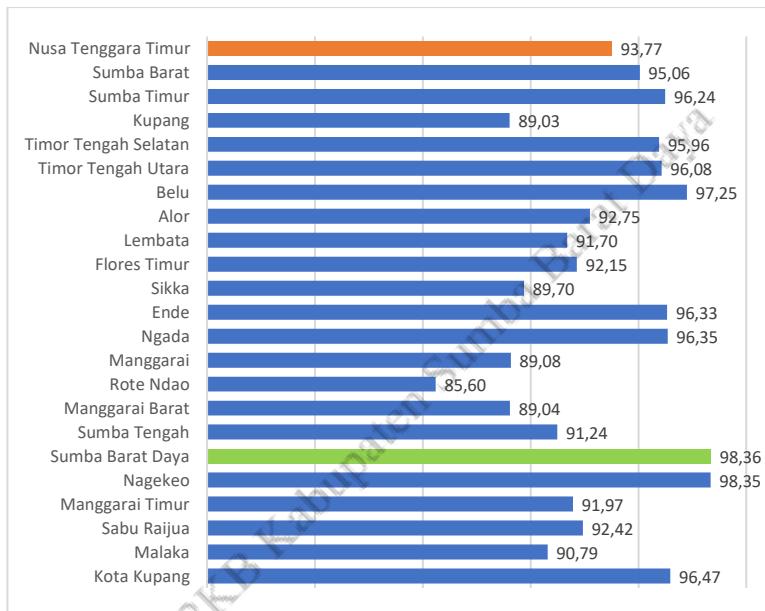


Sumber: Badan Pusat Statistik

Perkembangan capaian IPG di Kabupaten Sumba Barat Daya selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada grafik atas yang menunjukkan tren peningkatan secara umum. Pada tahun 2021, IPG tercatat sebesar 97,68 dan meningkat menjadi 98,36 pada tahun 2024. Kenaikan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2022, sementara pada tahun 2023 sempat terjadi penurunan sebesar 0,02 poin sebelum kembali meningkat pada tahun 2024. Nilai IPG yang sudah mendekati 100 dalam

empat tahun terakhir ini mencerminkan bahwa capaian pembangunan manusia antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di Kabupaten Sumba Barat Daya sudah hampir setara, terutama dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi.

Gambar 1.4 Indeks Pembangunan Gender menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari diagram di atas, dapat diketahui bahwa IPG di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2024 berada di atas rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai IPG sebesar 93,77 dan merupakan yang tertinggi di antara 21 kabupaten/kota lainnya. Di urutan kedua yaitu Kabupaten Nagekeo dengan capaian IPG yang hanya berselisih 0,01 poin dengan Kabupaten Sumba Barat Daya.

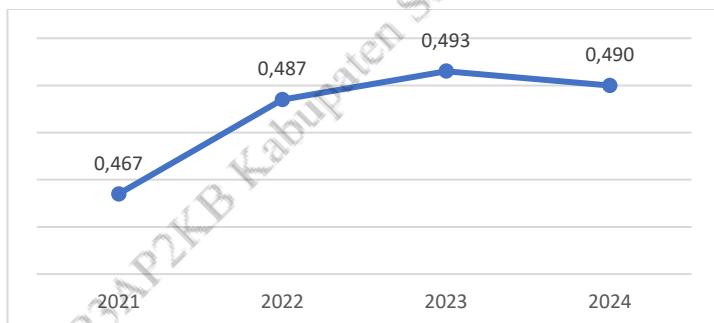
D. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di suatu wilayah. Nilai IKG memiliki skala antara 0-1. Semakin mendekati

0, nilai tersebut mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin kecil. Dengan kata lain, semakin rendah nilai IKG, semakin setara kondisi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan.

IKG merupakan indeks komposit yang tersusun atas tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan, dan dimensi pasar tenaga kerja. Dimensi kesehatan reproduksi disusun oleh dua indikator, yaitu proporsi perempuan umur 15-49 tahun selama dua tahun terakhir melahirkan anak lahir hidup terakhir tidak di fasilitas kesehatan (MTF), serta proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup pertama pada usia di bawah 20 tahun (MHPK20). Sementara itu, dimensi pemberdayaan diwakili oleh persentase anggota legislatif (laki-laki dan perempuan) serta persentase penduduk berumur 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA (laki-laki dan perempuan). Selanjutnya, dimensi pasar tenaga kerja diukur melalui indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan.

Gambar 1.5 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik

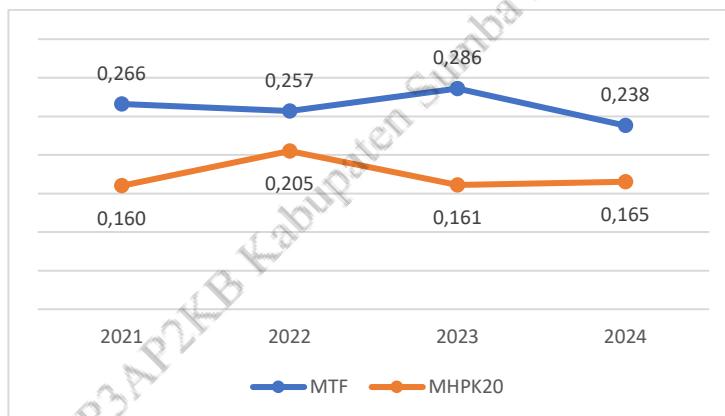
Gambar di atas menunjukkan tren perkembangan capaian IKG dalam empat tahun terakhir, yang memperlihatkan terjadinya kenaikan nilai IKG di Kabupaten Sumba Barat Daya dari 2021 sampai 2024. Dari tahun 2021 hingga 2023, nilai IKG terus mengalami kenaikan, dengan angka IKG pada tahun 2023 merupakan yang paling tinggi selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2024 angka IKG mengalami sedikit penurunan ke angka 0,490, namun masih lebih tinggi 0,023 poin daripada tahun 2021. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan ketimpangan gender di Kabupaten Sumba Barat Daya selama empat tahun terakhir.

Capaian IKG di atas berbanding terbalik dengan capaian IPG yang menunjukkan tren positif dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan antara penduduk laki-laki dan perempuan sudah lebih merata, akan tetapi ketimpangan dalam peran strategis dan produktif perempuan masih relatif besar.

Guna menganalisis penyebab naiknya angka IKG di Kabupaten Sumba Barat Daya, diperlukan peninjauan lebih lanjut terhadap tren dari setiap dimensi penyusunnya, karena setiap dimensi mencerminkan aspek berbeda dari ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, seperti akses terhadap pelayanan kesehatan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta partisipasi dalam dunia kerja.

Berikut ini merupakan perkembangan dari dimensi kesehatan reproduksi dari tahun 2021 hingga tahun 2024.

Gambar 1.6 Capaian MTF dan MHPK200 di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021-2024



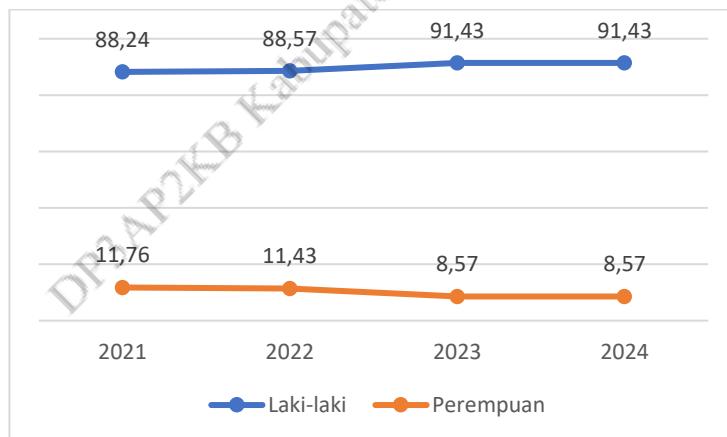
Sumber: Badan Pusat Statistik

Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang selama dua tahun terakhir melahirkan anak lahir hidup terakhir tidak di fasilitas kesehatan (MTF) menunjukkan tren yang fluktuatif selama empat tahun terakhir. Angka tersebut turun sedikit pada 2022 di angka 25,7 persen dari sebelumnya 26,6 persen pada tahun 2021. Kemudian, angka tersebut naik ke angka 28,6 persen di tahun 2023 sebelum akhirnya turun kembali di angka 23,8 persen pada tahun 2024. Penurunan sebesar 2,8 persen dalam empat tahun terakhir mengindikasikan adanya perbaikan akses atau kesadaran terhadap pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan, meskipun perubahan yang terjadi masih bersifat naik-turun dan belum stabil.

Demikian pula proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup pertama pada usia di bawah 20 tahun (MHPK20), menunjukkan tren yang mirip selama 2021 hingga 2024. Pada dimensi kesehatan reproduksi, indikator MTF memiliki tren yang relatif membaik. Sementara itu, pada indikator MHPK20, terdapat sedikit kenaikan proporsi perempuan yang melahirkan anak di usia di bawah 20 tahun. Dibandingkan dengan tahun 2021, capaian MHPK202 tahun 2024 masih menunjukkan sedikit kenaikan sebesar 0,5 persen, yang mengindikasikan bahwa praktik melahirkan pada usia dini masih cukup umum dan belum mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Selanjutnya, dimensi pemberdayaan dalam IKG mencerminkan sejauh mana perempuan memiliki peluang yang setara dengan laki-laki dalam akses pendidikan tinggi dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik. Dimensi ini diukur melalui dua indikator utama, yaitu proporsi keterwakilan di lembaga legislatif serta persentase penduduk berusia 25 tahun ke atas yang memiliki pendidikan minimal setara SMA. Kedua indikator ini memberikan gambaran tentang posisi perempuan dalam ranah politik dan sosial-ekonomi.

Gambar 1.7 Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Sumba Barat Daya yang Memiliki Keterwakilan di Legislatif, 2021-2024

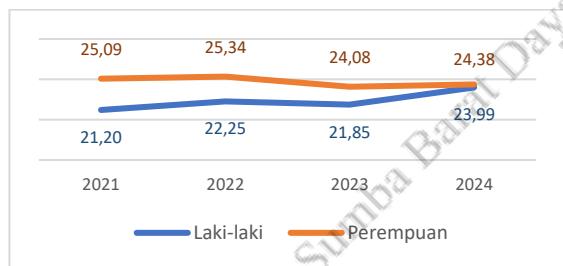


Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan diagram garis di atas, terlihat bahwa anggota legislatif di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki. Selama 2021 hingga 2024, persentase anggota legislatif laki-laki selalu jauh lebih tinggi dari anggota legislatif perempuan dan selalu

mengalami peningkatan setiap tahun. Jika dilihat dari perkembangan setiap tahunnya, jumlah anggota legislatif laki-laki selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Sebaliknya, persentase anggota legislatif perempuan mengalami penurunan secara konsisten dalam empat tahun terakhir. Jika tren ini terus berlanjut, partisipasi perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan formal berisiko semakin terpinggirkan, sehingga upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam ranah politik akan semakin sulit tercapai.

Gambar 1.8 Persentase Penduduk Berpendidikan Minimal SMA menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik

Di sisi lain, di kelompok penduduk usia 25 tahun ke atas, persentase perempuan yang memiliki pendidikan minimal SMA selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada periode 2021 hingga 2024. Artinya, dari total perempuan di kelompok usia tersebut, proporsi yang mengenyam pendidikan SMA ke atas lebih besar dibandingkan proporsi pada laki-laki. Meskipun demikian, proporsi tersebut masih tergolong rendah karena hanya sekitar seperempat dari total perempuan kelompok usia tersebut. Pada tahun 2024, persentase pada kelompok perempuan mengalami penurunan sebesar 0,71 persen dibandingkan tahun 2021, sedangkan pada kelompok laki-laki mengalami kenaikan sebesar 2,79 persen. Kesenjangan antara perempuan dan laki-laki pun semakin menyempit.

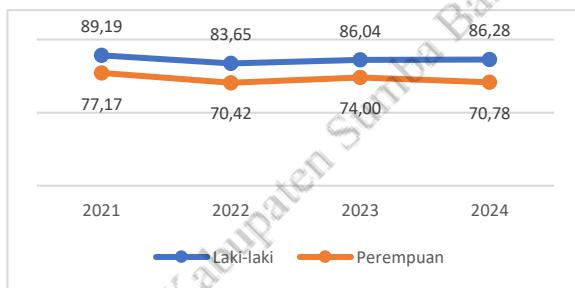
Jika ditinjau dari dua indikator dalam dimensi pemberdayaan tersebut, tampak bahwa kesenjangan masih cukup nyata. Partisipasi perempuan dalam legislatif tidak hanya rendah, tetapi juga terus menurun dalam empat tahun terakhir. Di sisi lain, meskipun persentase perempuan berpendidikan minimal SMA lebih tinggi dibanding laki-laki, angka ini masih tergolong rendah secara keseluruhan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan akses pendidikan belum sepenuhnya mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan publik, sehingga

dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk memperkuat representasi perempuan dalam ranah politik dan kepemimpinan daerah.

Dimensi terakhir dalam penyusunan IKG adalah pasar tenaga kerja, yang merupakan indikator penting dalam mengukur sejauh mana perempuan memiliki akses terhadap aktivitas ekonomi. Melalui indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dapat dilihat perbedaan keterlibatan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja.

Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan TPAK laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sumba Barat Daya selama periode 2021 hingga 2024.

Gambar 1.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama empat tahun terakhir, TPAK perempuan di Kabupaten Sumba Barat Daya selalu lebih rendah daripada TPAK laki-laki. Keduanya menunjukkan pola fluktuatif dari tahun 2021 hingga 2024. Meskipun TPAK laki-laki mengalami kenaikan pada tahun 2024, angka tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2021. Sementara itu, pada kelompok perempuan, TPAK turun cukup besar sampai dengan 6,39 persen dalam kurun waktu empat tahun. Penurunan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi dan akses terhadap kesempatan kerja semakin terbatas.

Berdasarkan tren dari setiap dimensi penyusunnya, kenaikan IKG di Kabupaten Sumba Barat Daya dapat disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah makin bertambahnya proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup pertama pada usia di bawah 20 tahun (MHPK20). Selain itu, terdapat kesenjangan yang semakin melebar antara jumlah laki-laki dan perempuan dalam hal

keterwakilan di lembaga legislatif, serta perbedaan yang semakin besar dalam tingkat partisipasi angkatan kerja. Ketimpangan-ketimpangan ini mencerminkan tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender yang lebih substansial di berbagai aspek kehidupan.

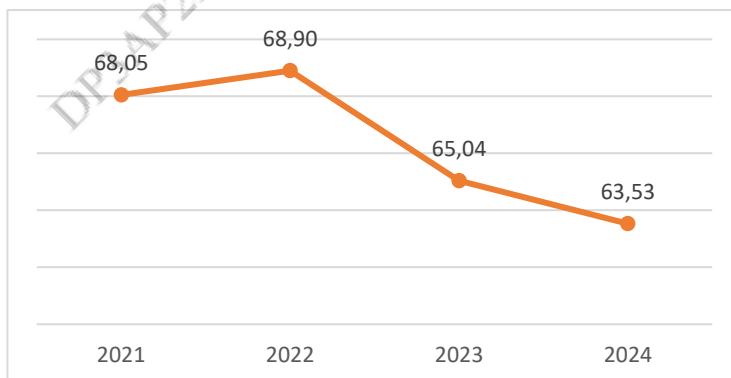
E. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, serta pengambilan keputusan penting di suatu wilayah. IDG memiliki rentang nilai antara 0-100, dimana semakin besar nilai IDG semakin besar pula keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan.

IDG disusun berdasarkan tiga dimensi utama. Dimensi pertama yaitu dimensi partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang diukur dari proporsi keterlibatan perempuan di parlemen. Dimensi kedua adalah dimensi partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang disusun berdasarkan proporsi perempuan yang bekerja sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, dan teknisi. Adapun dimensi ketiga yaitu dimensi penguasaan atas sumber daya ekonomi yang digambarkan melalui pendapatan rata-rata perempuan dibanding laki-laki.

Perkembangan capaian IDG di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2021 hingga 2024 dapat dilihat pada diagram garis di bawah ini.

Gambar 1.10 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021 - 2024



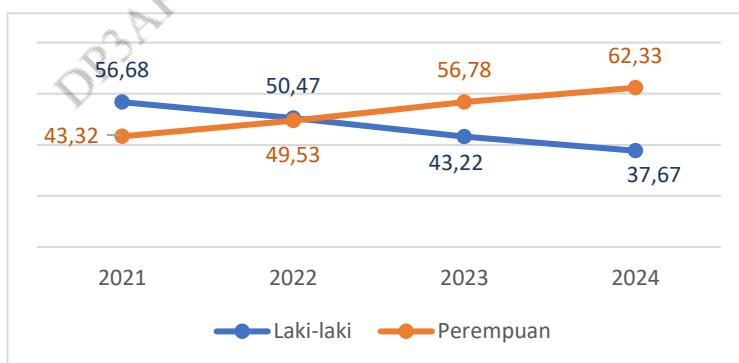
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.10 menunjukkan penurunan capaian IDG di Kabupaten Sumba Barat Daya selama kurun waktu empat tahun terakhir. Angka tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 4,52 dari 2021 ke 2024, meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan bahwa selama empat tahun terakhir, terjadi penurunan keterlibatan atau partisipasi aktif perempuan dalam bidang politik dan ekonomi.

Untuk memahami fenomena turunnya capaian IDG di Kabupaten Sumba Barat Daya, penting untuk menelaah lebih lanjut dinamika yang terjadi pada masing-masing dimensi penyusunnya. IDG dibentuk oleh tiga aspek utama, yakni partisipasi dalam pengambilan keputusan politik, keterlibatan dalam aktivitas ekonomi strategis, serta penguasaan terhadap sumber daya ekonomi. Perubahan dalam salah satu atau lebih dari ketiga dimensi ini dapat berdampak signifikan terhadap capaian IDG secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis terhadap tren masing-masing indikator dalam periode 2021 hingga 2024 menjadi krusial untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong penurunan IDG di daerah ini.

Perkembangan dari dimensi partisipasi politik dan pengambilan keputusan secara rinci sama seperti Gambar 1.7. Berdasarkan diagram tersebut, dapat dilihat bahwa komposisi anggota legislatif masih didominasi oleh laki-laki. Selama empat tahun terakhir, terjadi kesenjangan yang semakin besar antara penduduk laki-laki dan perempuan berumur 25 tahun ke atas. Hal tersebut secara tidak langsung juga menjadi penyebab turunnya capaian IDG di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Gambar 1.12 Persentase Penduduk yang Bekerja sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, dan Teknisi menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021-2024

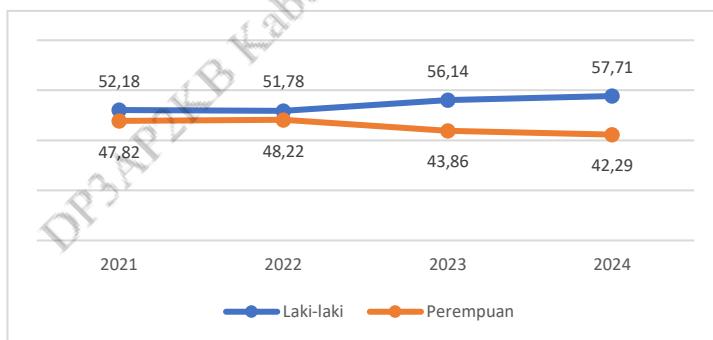


Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada dimensi partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, terjadi perubahan signifikan dalam komposisi gender pekerja di sektor strategis seperti manajerial, profesional, administrasi, dan teknisi selama empat tahun terakhir. Berdasarkan gambar di atas, terdapat adanya pergeseran dominasi dari laki-laki ke perempuan dalam sektor pekerjaan tersebut. Persentase perempuan yang bekerja sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, dan teknisi meningkat tajam, sedangkan penduduk laki-laki justru mengalami penurunan secara konsisten setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk perempuan di Kabupaten Sumba Barat Daya yang menduduki posisi strategis dalam dunia kerja. Sementara itu, penurunan partisipasi laki-laki dalam sektor ini bisa menandakan adanya perubahan dalam struktur ketenagakerjaan maupun pergeseran preferensi atau akses terhadap jenis pekerjaan tertentu.

Peningkatan partisipasi perempuan yang signifikan dalam pekerjaan strategis tidak serta merta berdampak pada peningkatan capaian IDG di Kabupaten Sumba Barat Daya. Hal ini disebabkan oleh masih adanya kesenjangan yang cukup besar pada dimensi lain penyusun IDG, salah satunya adalah dimensi penguasaan sumber daya ekonomi. Dimensi ini menyoroti sejauh mana perempuan memiliki akses dan kontrol terhadap pendapatan kerja yang setara dengan laki-laki

Gambar 1.13 Sumbangan dalam Pendapatan Kerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara umum penduduk laki-laki selalu memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan kerja, dengan tren yang meningkat selama empat tahun terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, sumbangan dalam pendapatan kerja dari penduduk laki-laki meningkat sebesar 5,53 persen. Sebaliknya, perempuan justru menunjukkan

penurunan, yang artinya kontribusi penduduk perempuan terhadap pendapatan kerja semakin kecil. Jika dilihat berdasarkan jaraknya, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi kesenjangan yang semakin melebar dalam hal kontribusi pendapatan kerja antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan.

Seperti terlihat pada Gambar 1.12, jumlah penduduk perempuan yang bekerja di sektor strategis mengalami peningkatan yang signifikan. Tetapi, kontribusi dari penduduk perempuan pada pendapatan kerja justru cenderung menurun. Hal ini kemungkinan karena dominasi perempuan di sektor pekerjaan dengan upah lebih rendah atau jam kerja yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk laki-laki, sehingga peningkatan partisipasi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan penguasaan sumber daya ekonomi.

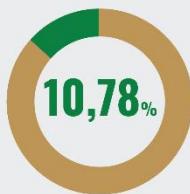
Dari uraian ketiga dimensi penyusun IDG di atas, dapat disimpulkan bahwa penurunan capaian IDG di Kabupaten Sumba Barat Daya dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat terjadi karena menurunnya representasi politik penduduk perempuan, serta semakin lebarnya kesenjangan dalam penguasaan sumber daya ekonomi antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Meskipun terjadi peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor pekerjaan strategis, hal tersebut belum mampu mengimbangi ketimpangan yang masih terjadi pada dua dimensi lainnya.

BAB II Kesehatan

Infografik



PENDUDUK YANG MEMILIKI GANGGUAN KESEHATAN DALAM SEBULAN TERAKHIR



LAKI - LAKI



PEREMPUAN

Proporsi perempuan yang mengalami gangguan kesehatan dalam sebulan terakhir lebih besar daripada laki - laki, dengan selisih sekitar 2 dari setiap 100 orang.



BADUTA YANG PERNAH DIBERI ASI



89,78 %

Badut berjenis kelamin laki - laki pernah diberi ASI



98,28 %

Badut berjenis kelamin perempuan pernah diberi ASI

RATA - RATA LAMA PEMBERIAN ASI



Rata - rata durasi pemberian ASI untuk Badut berjenis kelamin laki - laki

9,6 Bulan



Badut berjenis kelamin perempuan pernah diberi ASI

11,4 Bulan



DP3AP2KB Kabupaten Sumba Barat Daya

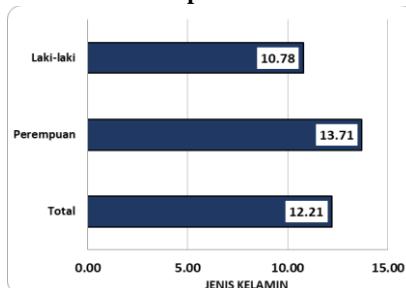
A. Gambaran Kondisi Kesehatan Penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya

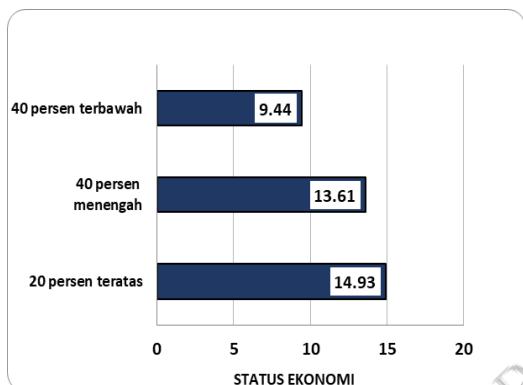
Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Kondisi kesehatan ibu sejak masa kehamilan, persalinan, hingga pengasuhan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun mental. Upaya peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, seperti pemeriksaan antenatal care, imunisasi, serta persalinan yang ditolong tenaga kesehatan, menjadi kunci penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta mencegah berbagai risiko kesehatan yang menghambat perkembangan anak.

Peran ibu sebagai pendamping utama anak menjadikan pengetahuan dan perilaku kesehatan ibu sangat menentukan kualitas hidup generasi mendatang. Oleh karena itu, intervensi kesehatan ibu dan anak tidak hanya dipandang sebagai layanan medis, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang yang akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Dengan dukungan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, diharapkan setiap ibu dan anak dapat memperoleh haknya untuk hidup sehat dan sejahtera.

Penyajian data persentase keluhan kesehatan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung pengambilan kebijakan kesehatan masyarakat yang berbasis bukti. Melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS tidak hanya merekam angka-angka statistik, tetapi juga menggambarkan realitas sosial terkait kondisi kesehatan penduduk Indonesia berdasarkan berbagai aspek, seperti jenis kelamin, status ekonomi, dan wilayah geografis.

Gambar 2.1 Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



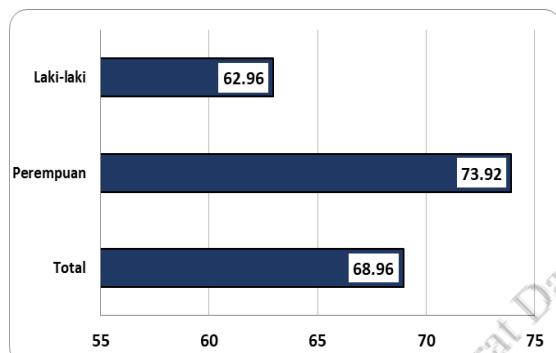


Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret, 2024

Data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2024 yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir mencapai 12,21%. Dengan kata lain, sekitar 1 dari setiap 8 penduduk mengalami gangguan kesehatan. Keluhan Kesehatan yang dialami oleh perempuan (13,71 persen) memiliki selisih absolut sebesar 2,93 persen jika dibandingkan dengan laki-laki (10,78 persen). Ini mencerminkan perbedaan biologis (misalnya hormonal), perilaku pencarian pelayanan kesehatan (*health-seeking behavior*), dan beban peran sosial yang lebih tinggi pada perempuan (terutama ibu rumah tangga atau pekerja ganda). Angka ini juga menunjukkan urgensi penerapan pendekatan *gender-sensitive* dalam perencanaan dan implementasi program kesehatan nasional. Misalnya, penyuluhan kesehatan dan pelayanan primer yang lebih proaktif untuk perempuan, termasuk pemeriksaan berkala yang menyesuaikan kebutuhan fisiologis dan psikososial perempuan.

Berdasarkan kelompok pendapatan, 20 persen penduduk dengan pendapatan teratas memiliki angka keluhan kesehatan tertinggi, yaitu sebesar 14,93 persen. Sementara angka keluhan kesehatan untuk kelompok pendapatan 40 persen menengah sebesar 13,61 dan kelompok pendapatan 40 persen terbawah sebesar 9,44 persen. Fenomena ini menegaskan bahwa status ekonomi berkorelasi dengan kemampuan mendeteksi, memahami, dan melaporkan kondisi Kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan harus mempertimbangkan disparitas dalam pelaporan dan akses layanan antar kelompok sosial ekonomi.

Gambar 2.2 Persentase Penduduk Sumba Barat Daya yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin, 2024



Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2024

Dalam rangka mewujudkan sistem kesehatan nasional yang inklusif dan merata, pemantauan terhadap penggunaan jaminan kesehatan oleh masyarakat saat mengakses layanan kesehatan menjadi salah satu indikator penting. Gambar 2.2 memberikan gambaran tentang sejauh mana penduduk memanfaatkan jaminan kesehatan, terutama program seperti BPJS Kesehatan pada saat berobat jalan (rawat jalan). Pada Tahun 2024, sebanyak 68,96 persen penduduk Sumba Barat Daya menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan selama sebulan terakhir. Hal ini berarti sekitar 31 dari setiap 100 penduduk belum memanfaatkan jaminan kesehatan saat berobat jalan. Ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga penduduk masih membayar layanan rawat jalan secara pribadi (*out-of-pocket*) atau mungkin belum terdaftar dalam sistem jaminan sosial nasional. Meskipun cakupan tersebut telah mendekati 70 persen, masih terdapat peluang perbaikan yang cukup besar. Berdasarkan jenis kelamin, persentase perempuan yang menggunakan jaminan kesehatan saat berobat jalan (73,92) lebih tinggi hampir 11 persen poin dibanding laki-laki (62,96).

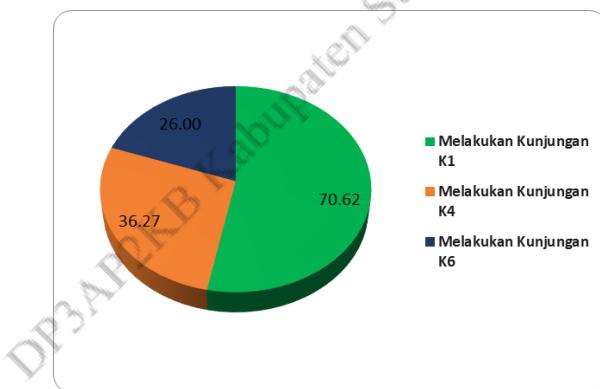
B. Kesehatan Ibu Hamil

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan ibu hamil guna menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Neonatal (AKN). Pelayanan kesehatan pada masa kehamilan juga bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani masa kehamilan yang sehat, bersalin dengan selamat, serta melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dilakukan melalui pelayanan antenatal yang terpadu dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten pada unit pelayanan kesehatan dasar.

Pelayanan pemeriksaan antenatal adalah kegiatan pemeriksaan rutin pada ibu hamil selama masa kehamilan dengan tujuan mendeteksi secara dini penanganan dan komplikasi kehamilan dan memantau tumbuh kembang bayi dan kesehatan ibu hamil. Pelayanan antenatal dapat diterima ibu hamil pada saat pelaksanaan posyandu maupun pada pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas, bidan di poliklinik, praktik dokter, maupun pada rumah sakit. Standar pelayanan antenatal yang berkualitas meliputi pemantauan kondisi ibu dan janin minimal sebanyak empat sampai enam kali; pengukuran berat badan, tekanan darah, dan lingkar lengan secara teratur; pemberian imunisasi tetanus difteri dan tablet tambah darah; serta pemeriksaan hemoglobin ataupun urin. Pelayanan antenatal juga meliputi penyuluhan perawatan diri dan kehamilan, serta konsultasi tentang persalinan.

Gambar 2.3 Persentase Ibu Hamil yang Melakukan Kunjungan K1, K4 dan K6 di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya

Gambar di atas menunjukkan bahwa dari total 8.767 ibu hamil pada tahun 2024, persentase kunjungan K1 (kunjungan pertama) cukup tinggi, yaitu sebesar 70,62%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil di Kabupaten Sumba Barat Daya telah mulai melakukan pemeriksaan kehamilan. Namun demikian, kunjungan K1 saja belum memadai untuk menjamin kehamilan yang sehat, karena masih diperlukan kunjungan antenatal lanjutan secara rutin. Cakupan kunjungan K4 dan K6 menunjukkan tren penurunan, masing-masing sebesar 36,27 persen dan 26 persen,

yang mengindikasikan bahwa hanya sekitar satu dari empat ibu hamil yang melanjutkan pemeriksaan kehamilan hingga trimester akhir. Padahal, peningkatan cakupan kunjungan K4 dan K6 sangat diperlukan untuk menekan risiko komplikasi kehamilan, sekaligus mendukung target penurunan AKI dan AKN sesuai indikator SDGs dan RPJMN.

Salah satu komponen dalam pemeriksaan antenatal adalah pemberian imunisasi Tetanus Difteri (TD). Imunisasi ini mempunyai peran penting dalam melindungi ibu dari infeksi tetanus saat persalinan serta melindungi bayi baru lahir dari infeksi tetanus yang bisa terjadi akibat proses pemotongan tali pusat yang tidak steril. Sasaran imunisasi ini adalah kelompok wanita usia subur (15-39 tahun) yang dapat diberikan sebelum dan/atau pada saat hamil.

Tabel 2.2 Jumlah dan Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Imunisasi Tetanus Difteri (TD) di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

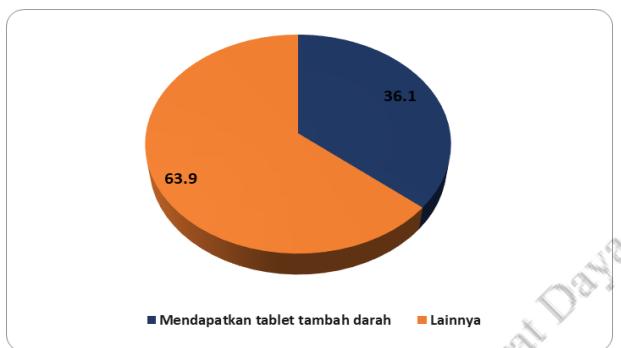
Indikator	Td2	Td3	Td4	Td5	Td2+
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan imunisasi tetanus difteri	592	290	108	89	1079
Persentase (%)	6.8	3.3	1.2	1.0	12.3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya

Berdasarkan Tabel 2.2, imunisasi yang diberikan kepada ibu hamil mencakup jenis Td2+, yaitu imunisasi tetanus difteri dengan minimal dua dosis (TD2 atau lebih) yang dianggap memberikan perlindungan terhadap infeksi tetanus. Pada Tahun 2024, jumlah ibu hamil yang mendapatkan Imunisasi Td2+ di Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 1.079 orang atau hanya sebesar 12,3 persen dari totalnya. Artinya, sekitar 88 persen ibu hamil belum terlindungi secara memadai terhadap tetanus, baik untuk dirinya sendiri maupun bayinya.

Selain itu, cakupan imunisasi pada dosis lanjutan—dari Td2 hingga Td5—terlihat cukup rendah dan mengalami penurunan pada setiap tahapan. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pemberian imunisasi belum optimal, terutama pada dosis lanjutan. Oleh karena itu, peningkatan cakupan imunisasi TD tidak hanya bergantung pada ketersediaan layanan, tetapi juga memerlukan penguatan sistem edukasi, pemantauan, dan pendampingan imunisasi secara berkelanjutan.

Gambar 2.4 Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya

Selain pemberian imunisasi TD bagi ibu hamil, pelayanan antenatal juga mencakup pemberian tablet tambah darah (tablet zat besi). Tujuannya adalah memastikan bahwa ibu hamil mendapat asupan zat besi yang cukup guna mencegah dan mengatasi anemia selama masa kehamilan. Secara standar, ibu hamil diberikan tablet tambah darah setiap hari selama masa kehamilannya atau minimal 90 tablet.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, pada tahun 2024 cakupan pemberian tablet tambah darah hanya mencapai 36,1 persen, artinya kurang dari separuh ibu hamil menerima suplemen zat besi. Sebanyak 63,9 persen ibu hamil tidak mendapatkan tablet tambah darah secara memadai, baik karena tidak menerima, tidak mengonsumsi, atau tidak tercatat.

C. Peningkatan Persalinan yang Aman Bagi Ibu dan Pemberian ASI

Gambar 2.5 Persentase Perempuan usia 15-49 Tahun menurut Penolong Kelahiran dan Tempat Melahirkan di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

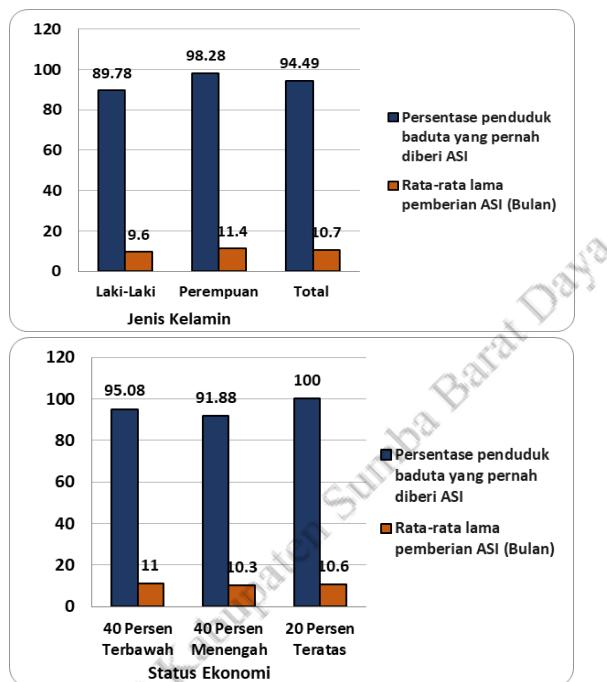


Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2024

Pada tahun 2024, terdapat 78,79 persen atau 4 dari 5 ibu di Kabupaten Sumba Barat Daya yang melahirkan anak lahir hidup sudah ditolong oleh tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan perawat. Sementara 21,21 persen atau 1 dari 5 ibu masih melahirkan dengan bantuan tenaga lainnya seperti dukun beranak. Angka yang cukup baik ini juga sejalan dengan persentase ibu yang melahirkan anak lahir hidup di fasilitas kesehatan sebesar 76,15 persen. Hal ini merupakan indikasi positif yang mencerminkan bahwa sebagian besar ibu telah memperoleh akses terhadap fasilitas kesehatan atau layanan profesional saat persalinan.

Air Susu Ibu (ASI) merupakan nutrisi utama dan terbaik untuk bayi, terutama dalam usia 0–23 bulan (baduta). WHO dan UNICEF merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, dilanjutkan dengan MPASI hingga usia 2 tahun atau lebih. Namun, praktik pemberian ASI di lapangan seringkali dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk jenis kelamin anak, budaya, literasi ibu, dukungan keluarga, dan kebijakan pemerintah.

Gambar 2.6 Persentase penduduk berumur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI dan Rata-Rata Lama Pemberian ASI



Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2024.

Berdasarkan grafik di atas, hampir seluruh penduduk berumur 0–23 bulan (baduta) perempuan pernah menerima ASI, yaitu sebesar 98,28 persen. Sementara itu, hanya sekitar 9 dari 10 baduta laki-laki yang mendapatkan ASI, yaitu sebesar 89,78 persen. Secara keseluruhan, cakupan pemberian ASI kepada baduta di Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan keberhasilan program, namun terdapat selisih yang cukup signifikan antara jenis kelamin, yakni sebesar 8,5 persen.

Jika dilihat dari rata-rata lama pemberian ASI, baduta perempuan menerima ASI lebih lama (11,4 bulan) dibandingkan baduta laki-laki (9,6 bulan). Adapun rata-rata keseluruhan lama pemberian ASI di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2024 adalah 10,7 bulan—angka ini belum mencapai standar yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu 24 bulan. Meskipun durasi tersebut sudah melampaui masa ASI eksklusif selama 6 bulan, data ini menunjukkan bahwa banyak ibu masih menyapah lebih awal,

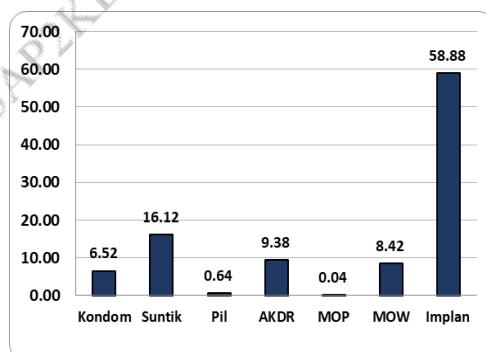
kemungkinan karena faktor pekerjaan, kurangnya edukasi, atau tekanan sosial di lingkungan sekitarnya.

Selain itu status ekonomi keluarga sering kali menjadi determinan penting dalam praktik pemberian ASI. Data pada Gambar 2.6 mengkaji hubungan antara tingkat ekonomi keluarga dan praktik menyusui anak usia 0–23 bulan di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024. Cakupan pemberian ASI cukup tinggi di semua kelompok ekonomi. Kelompok ekonomi tertinggi mencapai 100 persen, yang berarti seluruh baduta dari kelompok pendapatan 20 persen teratas pernah diberi ASI. Sementara persentase pemberian ASI terhadap kelompok pendapatan 40 persen menengah (91.88 persen) dan 40 persen terbawah (95.08 persen) memiliki persentase yang tidak berbeda signifikan. Rata-rata lama pemberian ASI paling lama dilakukan oleh penduduk dengan kelompok pendapatan terbawah (11 Bulan) disusul dengan kelompok pendapatan teratas (10.6 Bulan) dan kelompok pendapatan menengah (10.3 Bulan).

Pemberian ASI bukan hanya masalah ekonomi, tetapi menyangkut akses informasi, budaya kerja, dan dukungan sistemik. Pemerintah perlu mengintervensi secara holistik, khususnya pada kelompok menengah, agar setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama atas nutrisi terbaik sejak lahir.

D. Penggunaan Alat Kontrasepsi

Gambar 2.7 Persentase Akseptor KB Menurut Metode Kontrasepsi yang Digunakan, Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Barat Daya

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya pemerintah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak. Pemilihan metode kontrasepsi yang tepat dapat mendukung penurunan risiko kehamilan yang tidak direncanakan, mendukung kesehatan reproduksi, serta mengurangi angka kematian ibu dan bayi.

Dilihat dari efektivitasnya untuk mencegah kehamilan, alat kontrasepsi modern memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode tradisional. Dari beberapa jenis alat KB modern, implan (susuk KB) merupakan alat KB yang paling banyak digunakan oleh Akseptor KB di Sumba Barat Daya, yaitu sebesar 58,88 persen. Tingginya penggunaan implan menunjukkan bahwa akses dan penerimaan terhadap kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cukup baik. Selanjutnya diikuti oleh suntik KB dan AKDR (IUD) yang masing-masing sebesar 16,12 persen dan 9,38 persen. Ini menunjukkan bahwa mayoritas akseptor (tiga dari empat) telah beralih ke metode kontrasepsi jangka panjang, yang lebih efektif dalam jangka waktu panjang dan mendukung keberlanjutan program KB.

Tabel 2.5 Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat akan peserta KB Aktif di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

Kondom	Suntik	Pil	AKDR	MOP	MOW	Implan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1256	3106	123	1808	8	1622	11345	19268

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Barat Daya

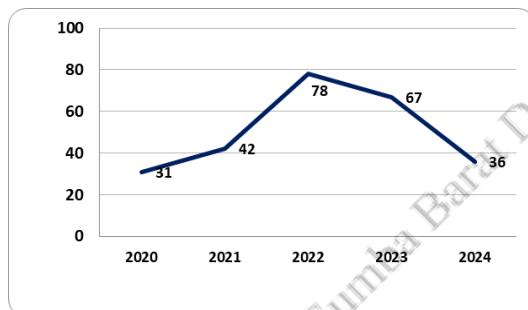
Pada tahun 2024, terdapat 46.023 pasangan usia subur dimana 19.268 atau 41,9 persen tercatat menjadi peserta KB aktif. Jenis alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah implan (11.345), diikuti oleh suntikan (31.06) dan AKDR (1.808).

E. Gambaran Kesehatan Anak

Angka Kematian Bayi (AKB) merujuk pada jumlah bayi yang meninggal pada fase kelahiran sampai masa belum mencapai satu tahun dalam 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu tertentu. AKB juga merupakan indikator utama dalam menilai derajat kesehatan suatu wilayah, khususnya dalam hal kesehatan ibu dan bayi, cakupan serta mutu pelayanan kesehatan dasar, status gizi, kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan Masyarakat.

Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pada bidang kesehatan.

Gambar 2.8 Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2020-2024



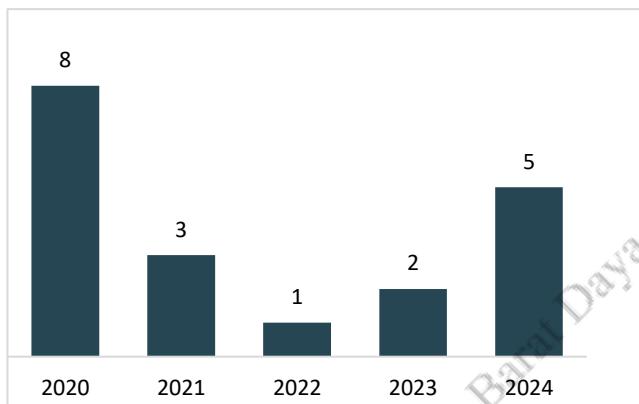
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jika dilihat dari jumlah kematian bayi yang bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama 2020 sampai 2024, jumlah kematian bayi mengalami fluktuasi. Jumlah kematian bayi meningkat cukup tajam dari 31 (2020) menjadi 78 (2022). Peningkatan hampir 151% dalam dua tahun, menunjukkan adanya lonjakan signifikan. Faktor ini bisa berkaitan dengan akses layanan kesehatan, kualitas gizi, atau dampak pandemi COVID-19 yang puncaknya berpengaruh pada 2021–2022. Setelah angka ini mencapai puncak di 2022, jumlah kematian bayi menurun menjadi 67 (2023) dan 36 (2024).

Angka Kematian Balita

Angka kematian balita adalah jumlah anak yang meninggal sebelum usia lima tahun per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan kesehatan masyarakat karena mencerminkan berbagai aspek seperti status gizi anak, kesehatan ibu selama kehamilan dan persalinan serta akses dan kualitas layanan kesehatan.

Gambar 2.9 Jumlah Kematian Balita di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2020-2024



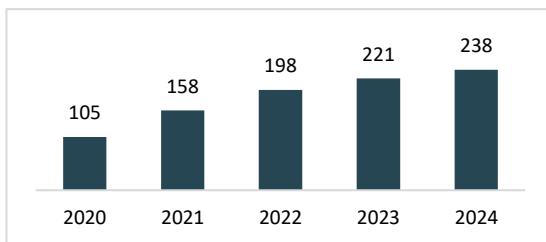
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan gambar di atas, jumlah kematian balita di Kabupaten Sumba Barat Daya sempat menurun sebelum meningkat kembali sejak 2023. Pada tahun 2020, tercatat sejumlah 8 kematian balita, lalu mengalami penurunan hingga menjadi 1 balita pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, jumlah ini kembali mengalami peningkatan menjadi 2 balita, dan terus meningkat menjadi 5 balita pada tahun 2024.

Berat Bayi Lahir Rendah

Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) adalah kondisi di mana bayi yang lahir memiliki berat badan kurang dari 2.500 gram (2,5 kg), terlepas dari usia kehamilan. Penyebab BBLR yaitu kelahiran prematur, kurangnya asupan gizi pada ibu hamil, dan adanya penyakit pada ibu seperti hipertensi. Kondisi BBLR berisiko meningkatkan kemungkinan terjadinya kematian neonatal dan gangguan pada tumbuh kembang bayi. Dalam jangka Panjang, BBLR juga dapat berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan kesehatan seseorang saat dewasa.

**Gambar 2.10 Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2020-2024**



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya

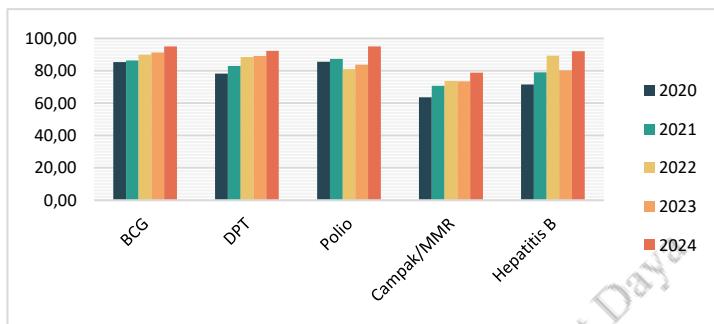
Jumlah BBLR di Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami tren peningkatan selama tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, terdapat 105 bayi dengan kondisi BBLR. Angka ini mengalami lonjakan yang mengkhawatirkan pada tahun-tahun setelahnya dengan peningkatan jumlah BBLR menjadi 238 bayi pada tahun 2024.

Imunisasi

Imunisasi merupakan intervensi kesehatan penting yang bermanfaat untuk melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya seperti campak, polio, dan hepatitis B. Melalui pemberian vaksin, sistem kekebalan tubuh dirangsang untuk mengenali dan melawan infeksi tanpa harus mengalami sakit terlebih dahulu, sehingga turut menurunkan angka kematian bayi dan balita, mencegah wabah dan penularan penyakit menular, serta membentuk *herd immunity* atau kekebalan kelompok.

Kementerian Kesehatan melalui Program Imunisasi Nasional (PIN) menyediakan 14 antigen termasuk *Bacillus Calmette Guerin* (BCG), Hepatitis B, Polio, DPT-HB-Hib, Campak-Rubella, PCV (pneumokokus), Rotavirus, HPV, dan vaksin Campak-Rubella lanjutan. Seorang anak dikatakan telah memperoleh imunisasi lengkap jika telah memperoleh imunisasi BCG sebanyak satu kali, *Diphtheria Pertusis Tetanus* (DPT) sebanyak tiga kali, Polio sebanyak tiga kali, Hepatitis B sebanyak tiga kali, dan imunisasi campak sebanyak satu kali. Pada umumnya, seorang anak akan menerima imunisasi lengkap setelah berumur 12 bulan.

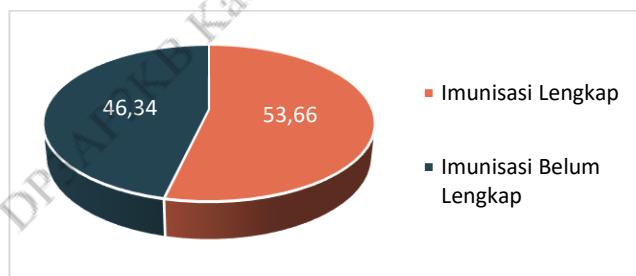
Gambar 2.11 Persentase Imunisasi Balita menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2020-2024



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat Daya, 2020-2024

Berdasarkan gambar di atas, persentase balita yang menerima imunisasi tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan PIN sudah berjalan dengan cukup baik. Namun, terlihat pada Gambar 2.12, cakupan imunisasi lengkap baru mencapai 53,66% pada tahun 2023, yang menunjukkan masih banyak balita yang belum menerima imunisasi dasar lengkap.

Gambar 2.12 Persentase Imunisasi Lengkap di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2023



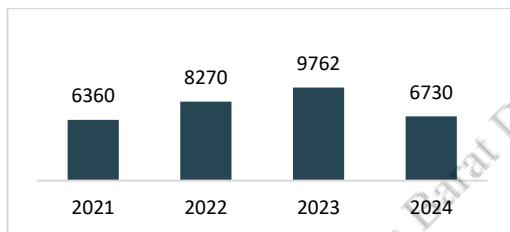
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat Daya, 2023

Status Gizi Balita

Status gizi balita merupakan indikator penting untuk menilai kesehatan dan kesejahteraan anak di masa pertumbuhan. Salah satu bentuk gangguan gizi yang banyak menjadi perhatian adalah *stunting*, yaitu kondisi anak yang memiliki tinggi

badan lebih rendah dari standar usianya. *Stunting* menggambarkan adanya masalah gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi yang dibutuhkan. Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi kondisi kesehatan ibu dan janin pada masa kehamilan, kondisi kesehatan selama masa bayi dan balita, namun juga berbagai kondisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan.

Gambar 2.13 Jumlah Balita *Stunting* di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021 - 2024



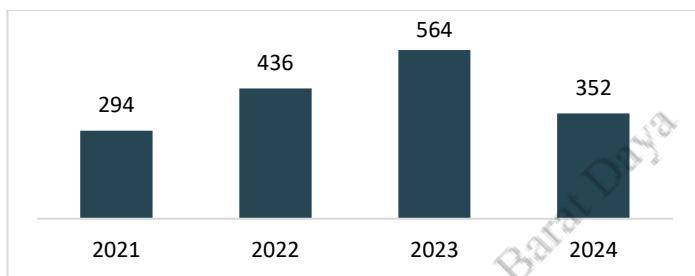
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah kasus balita *stunting* di Kabupaten Sumba Barat Daya sempat meningkat pada tahun 2021-2023 sebelum menurun pada tahun 2024. Pada tahun 2021, tercatat 6360 balita mengalami *stunting*, dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan 9762 kasus. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 6730 kasus. Meskipun demikian, jumlah tersebut tetap menempatkan Sumba Barat Daya sebagai wilayah dengan angka *stunting* tertinggi urutan kedua di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena *stunting* dapat berdampak jangka panjang, seperti anak tumbuh lebih pendek dari anak seusianya, rentan sakit karena sistem imun yang lemah, dan terganggunya perkembangan otak yang berpotensi menurunkan prestasi belajar.

Selain *stunting*, masalah gizi lain yang juga menjadi perhatian di Kabupaten Sumba Barat Daya adalah gizi buruk. Jika *stunting* menggambarkan kondisi kekurangan gizi kronis yang berlangsung lama dan berdampak pada pertumbuhan jangka panjang, gizi buruk merupakan bentuk kekurangan gizi yang lebih parah dan bersifat akut, yang dapat membahayakan nyawa balita jika tidak ditangani segera. Gizi buruk adalah kondisi kekurangan gizi yang parah yang terjadi akibat asupan makanan yang tidak mencukupi atau tidak seimbang dalam waktu lama, sehingga tubuh tidak mendapatkan energi dan zat gizi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berfungsi secara normal. Kondisi ini paling sering terjadi pada anak-anak, terutama balita, dan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, penurunan daya tahan tubuh, hingga kematian jika tidak ditangani segera. Balita yang mengalami gizi buruk memiliki ciri-ciri umum

seperti berat badan sangat rendah, *stunting*, tubuh terlihat kurus (*wasting*), otot mengecil dan lemas, wajah cekung dan tampak tua, dan pada kasus tertentu perut terlihat buncit.

Gambar 2.14 Jumlah Balita dengan Gizi Buruk di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

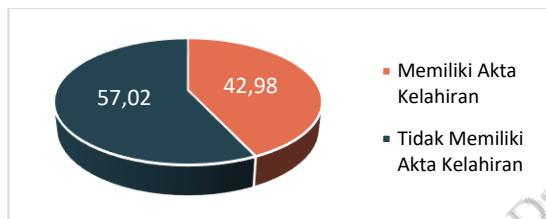
Sama seperti *stunting*, jumlah balita dengan gizi buruk di Kabupaten Sumba Barat Daya sempat meningkat pada tahun 2021-2023 lalu menurun pada tahun 2024. Pada tahun 2021, jumlah kasus balita dengan gizi buruk sebanyak 294 balita lalu terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan 564 balita yang menjadikan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan kasus balita gizi buruk tertinggi di Nusa Tenggara Timur. Namun, pada tahun 2024, kasus ini akhirnya menurun hingga menjadi 352 balita. Walaupun demikian, jumlah kasus ini masih menempatkan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan kasus balita gizi buruk tertinggi kedua di bawah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hal ini sangat penting menjadi perhatian pemerintah daerah karena gizi buruk memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan balita, menyebabkan sistem imun lemah yang memengaruhi kesehatan jangka panjang bahkan meningkatkan risiko kematian balita terutama jika disertai infeksi.

Akta Kelahiran Anak

Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang memuat data kelahiran seseorang, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, serta identitas orang tuanya. Dokumen ini menjadi identitas hukum pertama yang dimiliki oleh seseorang sejak ia lahir dan menjadi dasar penting dalam pengurusan dokumen-dokumen lain di kemudian hari. Tanpa dokumen ini, anak berisiko tidak mendapatkan akses terhadap

berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima.

Gambar 2.15 Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

Pada gambar di atas, pada tahun 2024, hanya sekitar 42,98 persen anak usia 0-17 tahun di Kabupaten Sumba Barat Daya yang memiliki akta kelahiran. Artinya, lebih dari separuh anak di kabupaten ini belum tercatat secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan, sebuah kondisi yang patut menjadi perhatian bersama.

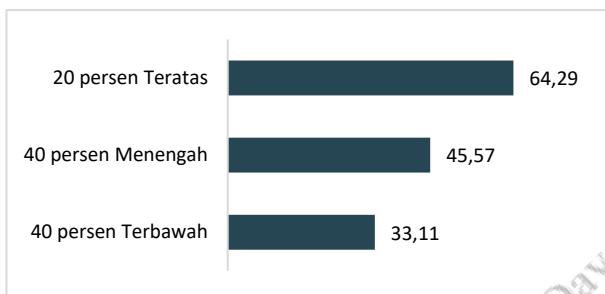
Gambar 2.16 Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, baik anak laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Sumba Barat Daya sebagian besar belum memiliki akta kelahiran. Hal ini terlihat dari persentase kepemilikan yang masih berada di bawah 50 persen, yaitu 42,96 persen untuk laki-laki dan 43,00 persen untuk perempuan.

Gambar 2.17 Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



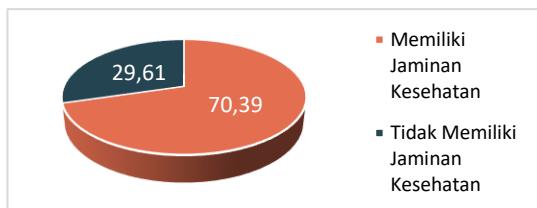
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

Sementara itu, jika dibandingkan berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangga, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Anak usia 0–17 tahun dari rumah tangga dengan pengeluaran 20 persen teratas memiliki tingkat kepemilikan akta kelahiran sebesar 64,29 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok 40 persen menengah (45,57 persen) dan 40 persen terbawah (33,11 persen). Temuan ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi penghalang dalam pengurusan dokumen dasar seperti akta kelahiran. Oleh karena itu, pemerintah dapat menjadikan kelompok pengeluaran terbawah dan menengah sebagai sasaran prioritas dalam memperluas akses dan mempermudah proses kepemilikan akta kelahiran bagi anak-anak di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar luran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Perpres No. 59 Tahun 2024). Jaminan kesehatan penting dimiliki oleh setiap penduduk untuk memastikan akses terhadap pelayanan kesehatan ketika mengalami gangguan kesehatan.

Gambar 2.18 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

Berdasarkan gambar 2.16, penduduk di Kabupaten Sumba Barat Daya sudah memiliki jaminan kesehatan sekitar 70,39 persen. Artinya, sekitar 70,39 persen penduduk Sumba Barat Daya telah tercakup dalam program jaminan kesehatan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk sudah memiliki perlindungan dalam mengakses layanan kesehatan. Namun, masih ada sekitar 29,61 persen yang belum terlindungi sehingga berpotensi mengalami hambatan dalam mendapatkan pelayanan medis terutama dalam kondisi darurat.

Gambar 2.19 Persentase Penduduk berdasarkan Kepemilikan Jaminan Kesehatan menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

Sementara itu, jika dibandingkan menurut jenis kelamin, sebagian besar penduduk baik laki-laki maupun perempuan telah memiliki jaminan kesehatan. Sebanyak 68,96 persen laki-laki dan 71,90 persen perempuan tercatat sebagai peserta jaminan kesehatan. Di sisi lain, masih terdapat sekitar 31,04 persen laki-laki dan 28,10

persen perempuan yang belum terjangkau, yang menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan kemudahan akses pendaftaran layanan kesehatan.

Kondisi Kesehatan Ibu di Kabupaten Sumba Barat Daya

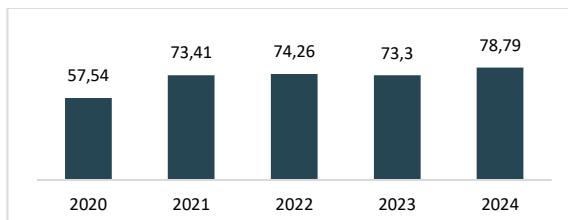
Kondisi kesehatan ibu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan dasar, khususnya pada masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Berbagai tantangan seperti keterbatasan akses layanan, status gizi, dan ketersediaan tenaga kesehatan masih dihadapi oleh sebagian ibu di Kabupaten Sumba Barat Daya. Salah satu indikator kritis yang mencerminkan tantangan ini adalah kematian ibu.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kematian ibu mencakup penyediaan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau. Upaya lanjutan mencakup pemberian akses terhadap pemeriksaan antenatal, serta pendampingan oleh tenaga kesehatan yang terampil selama masa persalinan dan pasca persalinan.

Risiko kematian ibu dapat dikurangi secara signifikan jika sedini mungkin proses kehamilan dan persalinan dilakukan pada fasilitas kesehatan dan dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Fasilitas kesehatan yang dimaksud adalah rumah sakit (baik pemerintah maupun swasta), rumah bersalin atau klinik, puskesmas, pustu, praktik tenaga kesehatan, dan polindes/poskesdes. Adapun tenaga kesehatan terlatih mencakup dokter kandungan, dokter umum, bidan, dan perawat. Hal ini akan menjamin ibu memperoleh standar perawatan persalinan dengan peralatan yang memadai.

Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana akses perempuan terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan saat persalinan bervariasi menurut latar belakang sosial ekonomi. Grafik berikut menyajikan data terkait persalinan oleh tenaga kesehatan dan tempat persalinan berdasarkan kelompok pengeluaran dan tingkat pendidikan.

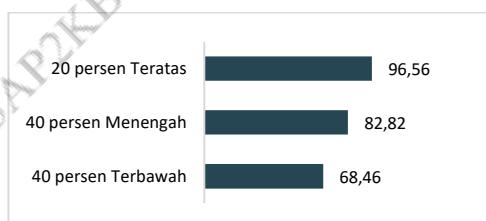
Gambar 2. 20 Perempuan Pernah Kawin (PPK) Umur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dengan Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

Persentase perempuan pernah kawin (PPK) umur 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup (ALH) dengan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan menunjukkan tren peningkatan selama tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, angkanya tercatat sebesar 57,54 persen dan meningkat signifikan menjadi 78,79 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak ibu yang mendapatkan layanan persalinan dari tenaga kesehatan terlatih, yang tentunya lebih sesuai dengan prosedur standar persalinan dan aman bagi ibu maupun bayi.

Gambar 2.21 Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) Umur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dengan Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

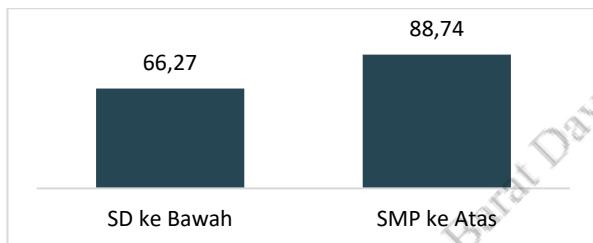


Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

Dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, semakin tinggi tingkat pengeluaran rumah tangga, semakin besar pula proporsi ibu yang ditolong oleh tenaga kesehatan saat melahirkan. Pada tahun 2024, kelompok 20 persen rumah tangga dengan pengeluaran tertinggi menunjukkan persentase tertinggi yakni 96,56 persen, sementara kelompok 40 persen terbawah hanya sebesar 68,46 persen. Artinya, sekitar 31,54 persen ibu di kelompok ini masih belum memperoleh pelayanan persalinan oleh

tenaga kesehatan. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan akses layanan kesehatan berdasarkan kondisi ekonomi.

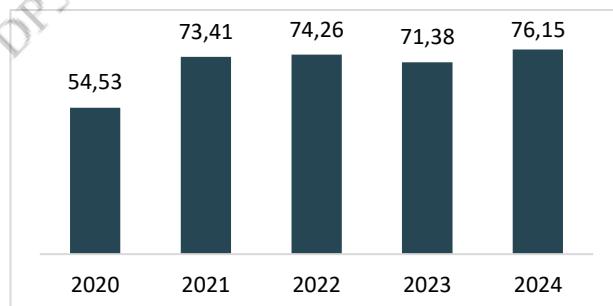
Gambar 2.22 Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) Umur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dengan Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

Perbedaan yang cukup mencolok juga terlihat jika dibandingkan berdasarkan tingkat pendidikan. Ibu dengan pendidikan tertinggi SMP ke atas lebih cenderung melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan (88,74 persen), dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan SD ke bawah (66,27 persen). Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang ibu, semakin besar kemungkinannya untuk memahami pentingnya persalinan yang aman dan memilih fasilitas serta tenaga kesehatan yang memadai.

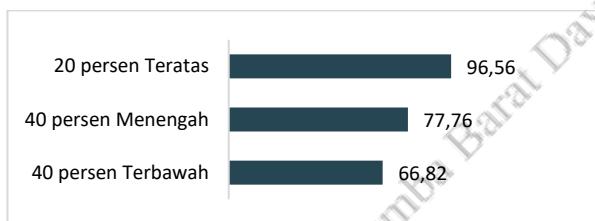
Gambar 2.23 Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) Umur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

Berdasarkan data Susenas Maret 2020–2024, terjadi peningkatan persentase PPK umur 15-49 tahun yang melahirkan ALH di fasilitas kesehatan. Kenaikan ini juga diiringi oleh peningkatan jumlah ibu yang ditolong oleh tenaga kesehatan saat persalinan. Pada gambar 2.23, terlihat bahwa persentase ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan sebesar 54,53 persen pada tahun 2020, dan meningkat menjadi 76,15 persen pada tahun 2024.

Gambar 2.24 Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) Umur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) di Fasilitas Kesehatan menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

Gambar 2.25 Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) Umur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) di Fasilitas Kesehatan menurut Pendidikan Tertinggi di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

Jika dibandingkan menurut kelompok pengeluaran (Gambar 2.24), terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pengeluaran rumah tangga, semakin tinggi pula persentase persalinan di fasilitas kesehatan. Ibu dari kelompok 20 persen teratas mencatat angka tertinggi (96,56 persen), sedangkan kelompok 40 persen terbawah hanya sebesar 66,82 persen. Hal serupa juga terlihat jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan. Ibu dengan pendidikan SMP ke atas lebih banyak melahirkan di fasilitas kesehatan (86,07 persen) dibandingkan dengan ibu berpendidikan SD ke bawah (63,69 persen).

BAB III Pendidikan

Infografik



9,81%

Perempuan pada tahun 2024
memiliki ijazah perguruan tinggi



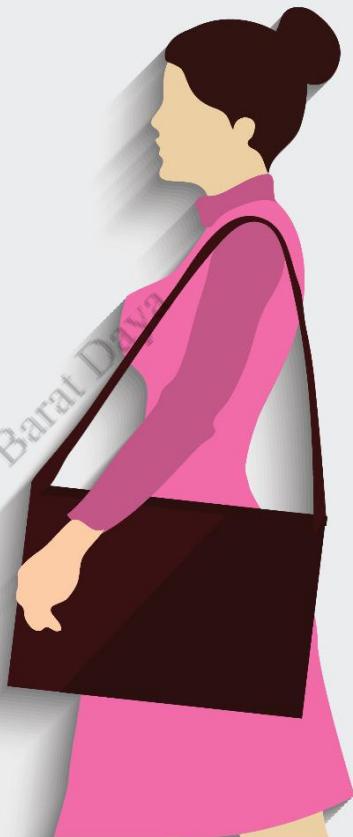
84,44%

Perempuan pada tahun 2024
mampu membaca dan menulis

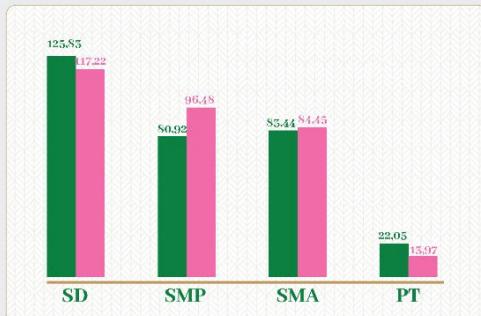


48%

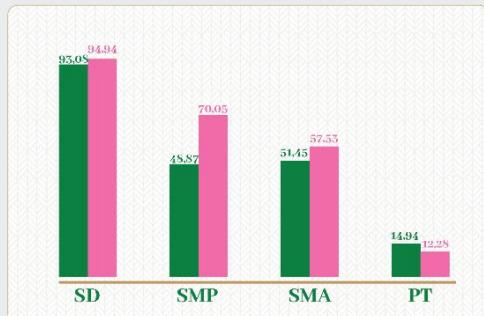
Peserta didik berumur 5-24 tahun yang
mengakses internet selama 3 bulan
terakhir berjenis kelamin perempuan



ANGKA PARTISIPASI KASAR MENURUT JENJANG PENDIDIKAN 2024



ANGKA PARTISIPASI MURNI MENURUT JENJANG PENDIDIKAN 2024



■ Laki - Laki ■ Perempuan

A. Gambaran Pendidikan Penduduk

Pendidikan merupakan pilar utama dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing. Pembangunan sektor pendidikan tidak hanya untuk meningkatkan partisipasi sekolah, tetapi juga menjamin kesetaraan akses hingga peningkatan mutu. Pendidikan menjadi landasan utama bagi suatu daerah untuk mendorong kemajuan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kondisi pendidikan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak. Untuk memahami kondisi pendidikan secara menyeluruh, penting untuk meninjau berbagai indikator yang mencerminkan capaian dan kesenjangan pendidikan masyarakat, baik menurut tingkat partisipasi, akses terhadap teknologi, maupun gender. Bab ini menyajikan berbagai data dan informasi mengenai potret pendidikan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pembinaan bagi anak sejak lahir hingga usia enam tahun. Berdasarkan Permendikbud No. 146 Tahun 2014, PAUD diselenggarakan menurut kelompok usia dan jenis layanan yang diberikan:

1. Untuk anak usia lahir hingga dua tahun (0-2 tahun), layanan PAUD diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak (TPA) atau layanan sejenis, seperti Satuan PAUD Sejenis (SPS).
2. Untuk anak usia dua sampai empat tahun (2-4 tahun), layanan PAUD diselenggarakan dalam bentuk Kelompok Bermain (KB) atau layanan sejenis.
3. Untuk anak usia empat sampai enam tahun (4-6 tahun) diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) atau satuan pendidikan sederajat lainnya.

Pemerintah melalui RUU Sisdiknas Agustus 2022 menetapkan perluasan Program Wajib belajar menjadi 13 tahun, mencakup jenjang prasekolah (kelas 0) hingga kelas 12. Kebijakan ini menjadi komitmen pemerintah dalam menjamin pendidikan setiap anak sejak usia dini. Pendidikan prasekolah atau PAUD menjadi awal proses pembentukan karakter dan perkembangan dasar anak sebelum memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Seiring dengan cakupan wajib belajar yang diperluas, ketersediaan lembaga PAUD yang berkualitas dan merata penting untuk memastikan semua anak mendapatkan pendidikan sejak usia dini.

Tabel 3.1. Jumlah Satuan Pendidikan PAUD di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

Kecamatan	TK (sederajat)	KB (sederajat)	TPA	SPS	Total
Kodi Bangedo	6	13	0	0	19
Kodi Balaghar	2	10	0	0	12
Kodi	6	18	0	0	24
Kodi Utara	7	32	0	0	39
Wewewa Selatan	6	26	0	0	32
Wewewa Barat	9	32	0	0	41
Wewewa Timur	8	15	0	0	23
Wewewa Tengah	8	38	0	0	46
Wewewa Utara	3	6	0	0	9
Loura	8	13	0	0	21
Kota Tambolaka	16	22	0	0	38
Sumba Barat Daya	79	225	0	0	304

Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa terdapat 304 lembaga pendidikan prasekolah yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Jenis Lembaga paling banyak adalah KB, dengan total 225 lembaga. Kecamatan dengan jumlah lembaga pendidikan prasekolah terbanyak adalah Wewewa Tengah dengan 46 lembaga, diikuti Wewewa Barat sebanyak 41 lembaga, dan Kodi Utara sebanyak 39 lembaga. Sementara itu, Wewewa Utara tercatat sebagai kecamatan dengan lembaga pendidikan prasekolah paling sedikit, yaitu hanya 9 lembaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumba Barat Daya telah memiliki lembaga PAUD yang tersebar di seluruh wilayah administrasi.

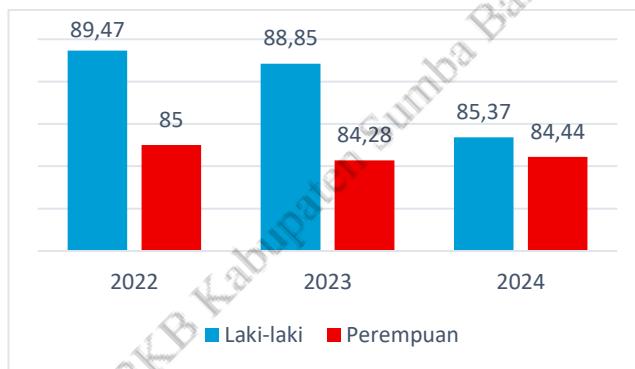
Tingkat Literasi Penduduk

Kemampuan membaca dan menulis merupakan pondasi utama dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Literasi ini menjadi landasan seorang individu untuk melanjutkan pendidikan. Untuk mengukur tingkat kemampuan dasar ini digunakan indikator Angka Melek Huruf (AMH). AMH adalah proporsi penduduk kelompok usia tertentu yang mampu membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin/alfabet, huruf arab/hijaiyah atau aksara lainnya.

Semakin tinggi AMH semakin menunjukkan bahwa penduduk memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dasar serta menguasai kemampuan membaca dan menulis dengan lebih baik.

Sebaliknya, angka buta huruf menunjukkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum atau tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis. Indikator ini dapat mengidentifikasi kelompok yang masih tertinggal kemampuan literasinya. Tingginya angka buta huruf memberikan gambaran kesenjangan pemerataan akses pendidikan, rendahnya partisipasi sekolah, atau kondisi sosial ekonomi yang tidak mendukung. Selain itu, indikator ini dapat dipengaruhi kelompok lansia yang belum mengenyam pendidikan formal pada masa mudanya.

Gambar 3.1 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2022-2024



Sumber: SUSENAS Maret 2022-2024

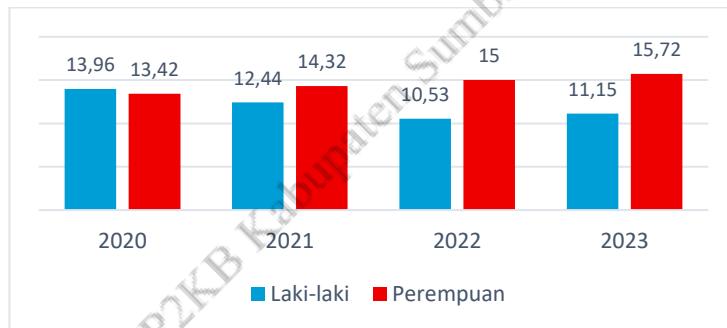
Grafik 3.1 menunjukkan AMH penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Sumba Barat Daya selama periode 2022–2024 menurut jenis kelamin. Kelompok usia 15 tahun ke atas dianggap telah melewati usia wajib belajar dan umumnya telah menyelesaikan pendidikan dasar sehingga dianggap telah memiliki kemampuan membaca dan menulis. Secara umum, AMH penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, AMH laki-laki secara konsisten tercatat lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Pada tahun 2022, AMH penduduk laki-laki tercatat sebesar 89,47 persen, sedangkan perempuan sebesar 85 persen dengan selisih sebesar 4,47 persen. Pada tahun 2023, laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan AMH dengan selisih 4,57 persen. Sementara pada tahun 2024, persentase AMH pada penduduk laki-laki

menurun cukup signifikan, yaitu menjadi 85,37 persen, sedangkan pada perempuan terjadi sedikit peningkatan menjadi 84,44 persen. Meski demikian, selisih antara keduanya menyempit menjadi 0,93 persen.

Tren tingkat literasi di Kabupaten Sumba Barat Daya yang mengalami penurunan mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan tingkat literasi masyarakat. Beberapa faktor tantangan tersebut, antara lain akses pendidikan dasar belum merata, tingginya angka putus sekolah, serta pelaksanaan program literasi berkelanjutan yang belum optimal. Selain itu, AMH laki-laki masih lebih tinggi daripada Perempuan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Namun, kesenjangan kemampuan membaca dan menulis antara laki-laki dan perempuan semakin menurun dalam tiga tahun terakhir yang menunjukkan arah perbaikan dalam akses dan partisipasi pendidikan bagi perempuan.

Gambar 3.2. Persentase Buta Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2020-2023



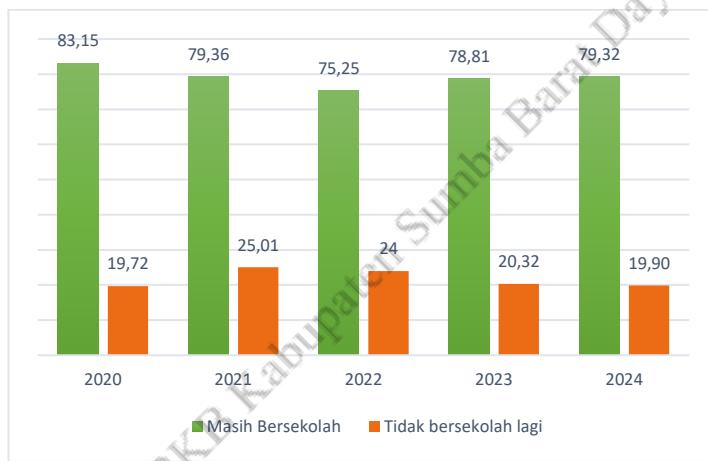
Sumber: SUSENAS Maret 2020-2024

Angka buta huruf di Kabupaten Sumba Barat Daya berfluktuasi dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Secara umum, persentase pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Pada tahun 2023, persentase buta huruf penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas sebesar 11,15 persen, sedangkan penduduk perempuan sebesar 15,72 persen. Hal ini menunjukkan bahwa selisih angka ini antara laki-laki dan perempuan semakin melebar, sehingga literasi dan pengembangan pendidikan untuk perempuan masih perlu perhatian khusus.

Status Pendidikan Anak

Status pendidikan anak memberikan gambaran keterlibatan anak-anak usia sekolah dalam sistem pendidikan. Indikator ini menunjukkan status bersekolah anak-anak, yaitu apakah masih bersekolah atau sudah tidak bersekolah lagi. Kelompok usia 7-24 tahun digunakan karena mencakup usia sekolah formal, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Informasi ini penting dalam mengidentifikasi pendidikan penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya.

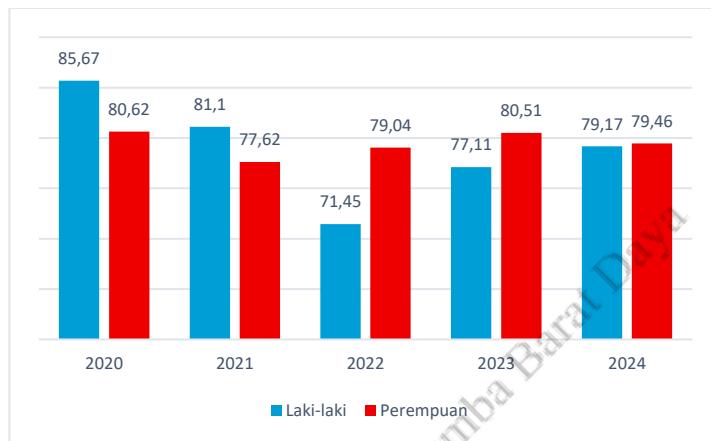
Gambar 3.3. Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun ke Atas menurut Status Pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2020-2024



Sumber: SUSENAS Maret 2020-2024

Selama periode 2020-2024, mayoritas anak berusia 7-24 tahun di Kabupaten Sumba Barat Daya tercatat masih bersekolah. Meskipun dalam tiga tahun terakhir terjadi peningkatan, tren tersebut didahului oleh penurunan selama dua tahun berturut-turut. Pada tahun 2020, jumlah yang masih bersekolah tercatat sebesar 83,15 persen sebelum akhirnya berangsur-angsur turun dan menyentuh angka terendah 75,25 persen pada 2022. Kenaikan kembali terjadi pada 2023 sebesar 78,81 persen dan 2024 sebesar 79,32 persen.

Gambar 3.4. Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2020-2024



Sumber: SUSENAS Maret 2020-2024

Gambar di atas menunjukkan dinamika partisipasi sekolah penduduk usia 7–24 tahun di Kabupaten Sumba Barat Daya menurut jenis kelamin. Dapat dilihat bahwa anak laki-laki yang masih bersekolah memiliki persentase lebih tinggi daripada perempuan pada tahun 2020-2021. Namun, mulai 2022 hingga 2024, proporsinya berbalik: persentase anak perempuan yang masih bersekolah melampaui laki-laki. Selain itu, pada tahun 2024, selisih persentase antara keduanya hampir setara, yaitu 79,17 persen dan 79,46 persen. Pola ini mencerminkan kemajuan ke arah kesetaraan gender dalam akses pendidikan, dengan kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan terus menyempit dari tahun ke tahun.

B. Gambaran Pendidikan Anak

Partisipasi Sekolah

Partisipasi Sekolah merupakan indikator penting untuk mengukur sejauh mana anak-anak terlibat dalam pendidikan formal sesuai jenjang usianya. Untuk mengukur tingkat partisipasi ini digunakan tiga indikator utama, yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Ketersediaan indikator ini memungkinkan analisis yang lebih rinci tentang seberapa

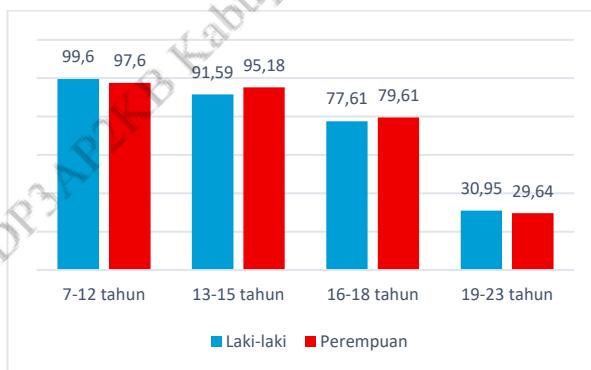
merata pendidikan menjangkau kelompok usia sekolah di suatu wilayah, serta mengidentifikasi jenjang pendidikan yang memerlukan perhatian lebih.

Konsep APK, APM, dan APS pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas yang digunakan mengacu pada konsep Kemendikbud, yaitu menggunakan kelompok usia 16-18 tahun. Hal ini dilakukan agar interpretasi yang digunakan sama dengan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator untuk melihat akses pada pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS merupakan persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu. Kegiatan bersekolah juga memperhitungkan jalur non formal, seperti paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/Mts, dan paket C setara SMA/MA. APS menunjukkan persentase penduduk pada kelompok umur tertentu yang sedang mengikuti pendidikan formal di jenjang apapun, seperti APS 7-12 tahun (usia SD), APS 13-15 tahun (usia SMP), APS 16-18 tahun (usia SMA), dan APS 19-24 tahun (usia perguruan tinggi). Nilai APS yang tinggi menunjukkan semakin terbukanya akses terhadap pendidikan pada kelompok umur tersebut.

Gambar 3.5. APS Anak menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: SUSENAS Maret 2024

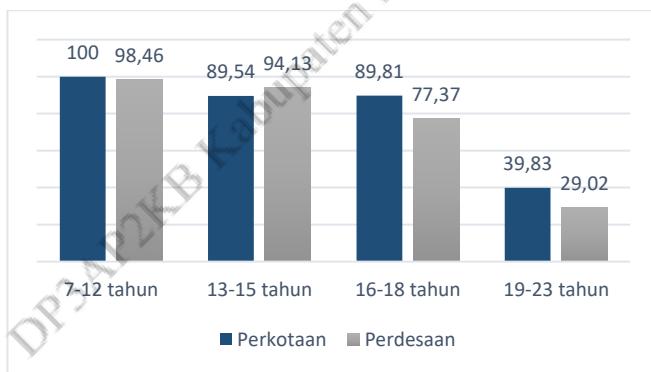
Secara umum, tidak terdapat kesenjangan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi pendidikan laki-laki dan perempuan relatif seimbang di sebagian besar kelompok umur. Pada tahun 2024, APS anak usia 7-12 tahun (setara SD) tergolong sangat tinggi, yaitu 99,6 persen pada

laki-laki dan 97,6 persen pada perempuan. Artinya, mayoritas anak usia sekolah dasar masih bersekolah. Dengan kata lain, dari 100 orang anak usia 7-12 tahun, 97 sampai 99 anak usia SD masih aktif bersekolah. Sementara hanya 1 sampai 3 orang yang tidak bersekolah (baik yang tidak/belum pernah bersekolah maupun yang tidak bersekolah lagi).

APS mulai menurun pada kelompok usia yang lebih tinggi. Untuk usia 13-15 tahun (setara SMP), partisipasi tercatat sebesar 91,6 persen pada laki-laki dan 95,2 persen pada perempuan. Penurunan berlanjut pada usia 16-18 tahun (setara SMA), dengan APS sebesar 77,61 persen untuk laki-laki dan 79,61 persen untuk perempuan.

Partisipasi paling rendah terjadi pada kelompok usia 19-23 tahun, yaitu hanya sebesar 30,95 persen pada laki-laki dan 29,64 persen pada perempuan. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar penduduk usia 19-23 tahun belum atau tidak sedang menempuh pendidikan formal pada jenjang manapun, termasuk jenjang perguruan tinggi.

Gambar 3.6. APS menurut Kelompok Umur dan Klasifikasi Wilayah di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun, 2024



Sumber: SUSENAS Maret 2024

Menurut klasifikasi wilayah, APS umumnya lebih tinggi di daerah perkotaan daripada daerah pedesaan. Pada kelompok usia 7-12 tahun, APS di perkotaan tercatat sebesar 100 persen, sedangkan di pedesaan sebesar 98,46 persen. Artinya, seluruh anak usia SD di wilayah perkotaan telah mengakses pendidikan dasar, didukung oleh ketersediaan sekolah dan sarana prasarana pendidikan yang umumnya lebih memadai dibanding di pedesaan.

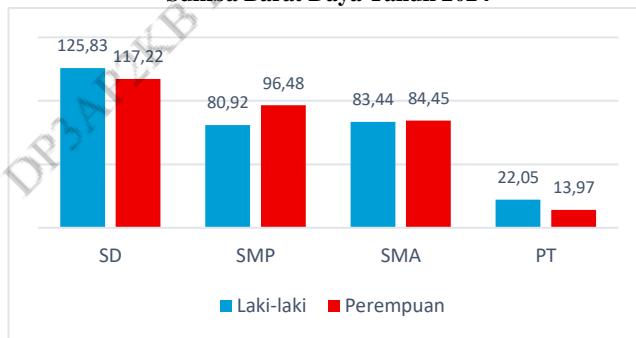
Untuk kelompok usia 13-15 tahun, APS di pedesaan justru lebih tinggi, yaitu 94,13 persen, dibandingkan perkotaan yang sebesar 89,54 persen. Namun, pada kelompok usia 16-18 tahun terjadi kesenjangan yang cukup mencolok: APS di perkotaan mencapai 89,81 persen, sedangkan di pedesaan sebesar 77,37 persen. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi anak kelompok usia 16-18 tahun di pedesaan yang belum atau tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang manapun, baik SMA maupun perguruan tinggi, masih cukup besar dan cenderung lebih besar.

Penurunan APS yang tajam juga terjadi pada kelompok usia 19-23 tahun di kedua wilayah. APS di perkotaan sebesar 39,83 persen, sedangkan di pedesaan 29,02 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa mayoritas anak usia 19-23 tahun di kedua wilayah belum atau tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan menurut jenjang pendidikan tanpa melihat umur. APK dihitung berdasarkan rasio antara jumlah peserta didik pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk pada kelompok umur resmi untuk jenjang tersebut. Nilai APK dapat melebihi 100 persen karena menghitung peserta didik yang usianya lebih tua atau lebih muda dari kelompok usia ideal. Indikator ini dapat mengidentifikasi ketepatan usia serta lonjakan partisipasi atau keterlambatan pendidikan di tiap jenjang.

Gambar 3.7. APK Jenjang Pendidikan menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024



Sumber: SUSENAS Maret 2024

APK di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 menunjukkan tren penurunan seiring meningkatnya jenjang pendidikan. APK untuk jenjang SD/sederajat tercatat paling tinggi, yakni mencapai 125,83 persen untuk laki-laki dan 117,22 persen untuk

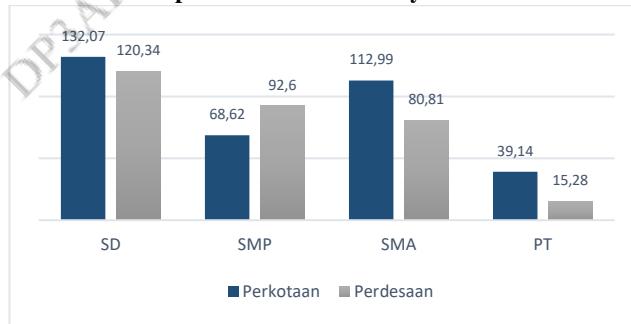
perempuan. Angka yang melebihi 100 persen ini menunjukkan bahwa terdapat peserta didik yang berada di luar kelompok usia ideal, baik karena masuk sekolah lebih awal maupun mengalami keterlambatan.

Memasuki jenjang sekolah menengah, untuk jenjang SMP/sederajat, partisipasi mulai menurun menjadi 80,92 persen untuk laki-laki dan 96,48 persen untuk perempuan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa adanya masalah dalam transisi dari jenjang SD ke SMP, terutama bagi anak laki-laki. Sementara, pada jenjang SMA/sederajat, APK laki-laki dan perempuan relatif setara, yakni 83,44 persen dan 84,45 persen. Akan tetapi, angka ini masih belum mencapai 100 persen yang menunjukkan bahwa tidak semua peserta didik usia ideal (16-18 tahun) melanjutkan ke jenjang SMA/sederajat.

Selain itu, penurunan paling tajam terlihat pada APK Perguruan Tinggi, yaitu hanya sebesar 22,05 persen untuk laki-laki dan 13,97 persen untuk perempuan. Artinya, dari seluruh penduduk yang sedang melanjutkan pendidikan tinggi, jumlahnya jauh lebih kecil dibanding total penduduk yang berada pada jenjang tersebut, tanpa memperhitungkan kelompok usia ideal.

Secara keseluruhan, APK di Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan masih tinggi pada jenjang dasar, namun cenderung menurun pada jenjang yang lebih tinggi, terutama perguruan tinggi. Pola ini mencerminkan belum meratanya keterjangkauan dan keberlanjutan pendidikan bagi seluruh penduduk, baik karena keterbatasan fasilitas pendidikan maupun faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi keputusan untuk melanjutkan sekolah.

Gambar 3.8. APK Jenjang Pendidikan menurut Wilayah di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024



Sumber: SUSENAS Maret 2024

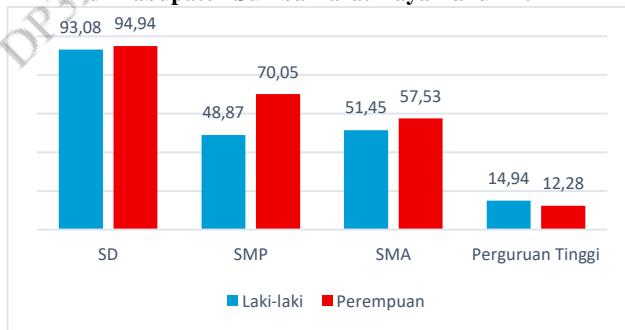
Berdasarkan klasifikasi wilayahnya, terdapat kesenjangan partisipasi pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 berdasarkan APK. Secara umum, anak-anak di wilayah perkotaan memiliki tingkat partisipasi pendidikan yang lebih tinggi pada hampir semua jenjang pendidikan.

Pada jenjang SD/sederajat, APK di perkotaan (132,07%) lebih tinggi dibanding pedesaan (120,34%), menandakan lebih banyak anak di luar usia ideal yang bersekolah di perkotaan. Di jenjang SMP, APK pedesaan justru lebih tinggi (92,6%) dibanding perkotaan (68,62%), kemungkinan karena keterlambatan masuk sekolah atau pengulangan kelas. Namun, pada jenjang SMA dan perguruan tinggi, APK di perkotaan jauh lebih tinggi masing-masing sebesar 112,99% dan 39,14%, dibanding pedesaan sebesar 80,81% dan 15,28%. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan lanjutan, lebih banyak penduduk perkotaan yang tercatat mengikuti pendidikan formal, termasuk mereka yang berada di luar usia ideal untuk jenjang tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM)

APM menunjukkan persentase penduduk usia ideal yang sedang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Sama seperti APS, APM dibedakan menjadi APM SD/sederajat, APM SMP/sederajat, APM SMA/sederajat, dan APM Perguruan Tinggi. Berbeda dengan APK, APM hanya menghitung peserta didik yang usianya sesuai standar umur jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APM, semakin sedikit siswa yang terlambat masuk atau tertinggal di jenjang pendidikan tertentu. Jadi, apabila APM mencapai 100 persen, maka seluruh anak usia sekolah dikatakan bersekolah tepat waktu.

Gambar 3.9. APM Jenjang Pendidikan menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024

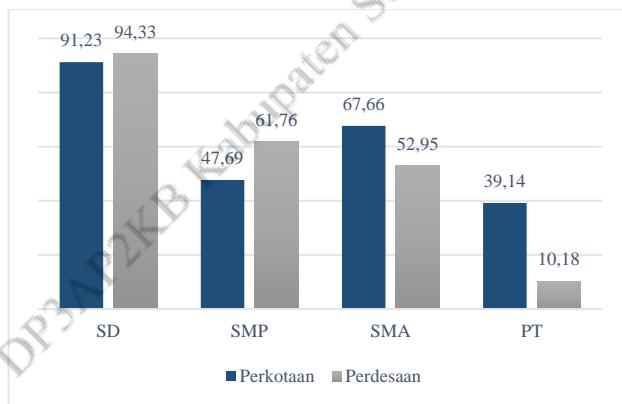


Sumber: SUSENAS Maret 2024

APM pada jenjang SD/sederajat di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 menunjukkan capaian yang tinggi dan relatif setara antar jenis kelamin. Dari setiap 100 anak usia sekolah dasar, sekitar 93 anak laki-laki dan 95 anak perempuan bersekolah tepat waktu di jenjang tersebut. Akan tetapi, pada jenjang SMP/sederajat, terlihat ketimpangan yang cukup lebar, di mana untuk laki-laki sebesar 48,87 persen, jauh di bawah perempuan yang mencapai 70 persen. Hal yang sama juga terlihat pada jenjang SMA/sederajat, meskipun lebih kecil, yaitu 57,53 persen untuk perempuan dan 51,45 persen untuk laki-laki.

Sementara itu, APM perguruan tinggi menunjukkan partisipasi yang sangat rendah pada kedua kelompok, yaitu 14,94 persen untuk laki-laki dan 12,28 persen untuk perempuan. Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan masih adanya kesenjangan partisipasi pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan antara laki-laki dan perempuan, dengan kecenderungan bahwa perempuan lebih banyak bersekolah sesuai usia idealnya dibanding laki-laki.

Gambar 3.10. APM Jenjang Pendidikan menurut Wilayah di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: SUSENAS Maret 2024

Secara umum, menurut tipe daerah, terdapat perbedaan partisipasi murni antara kelas wilayah di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024. Partisipasi murni di pedesaan lebih tinggi pada jenjang SD dan SMP, yaitu masing-masing 94,33 persen dan 61,76 persen. Sebaliknya, di perkotaan, partisipasi murni pada jenjang SMA dan perguruan tinggi lebih tinggi, masing-masing sebesar 67,66 persen dan 39,14 persen. Pola ini menunjukkan bahwa anak-anak di pedesaan lebih banyak bersekolah tepat

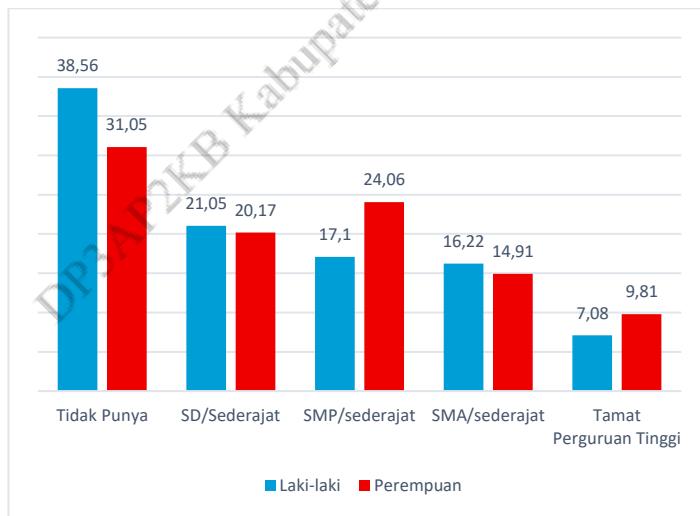
waktu di jenjang dasar dan menengah pertama, sementara anak-anak di perkotaan lebih banyak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai usia idealnya.

APK di semua jenjang pendidikan lebih tinggi daripada APM di setiap jenjang pendidikan. Ini menunjukkan bahwa di setiap jenjang pendidikan, ada anak yang bersekolah di luar umur yang seharusnya di jenjang pendidikan tersebut karena bersekolah lebih cepat, terlambat dari umur yang seharusnya, dan mengulang kelas.

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Informasi mengenai pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk diperoleh berdasarkan ijazah tertinggi yang dimiliki. Indikator ini menggambarkan distribusi capaian pendidikan dalam masyarakat, terkait sejauh mana penduduk berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan, mulai dari tidak/belum sekolah, pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Selain itu, indikator ini juga dapat mengidentifikasi pola ketimpangan pendidikan antar kelompok masyarakat.

Gambar 3.11. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: SUSENAS Maret 2024

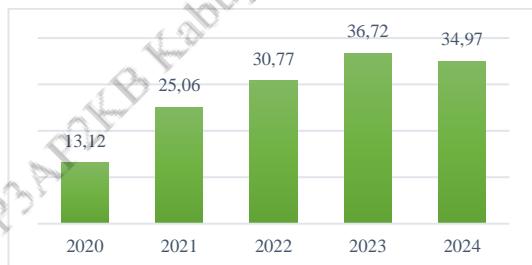
Pada jenjang SD/sederajat dan SMA/sederajat, proporsi laki-laki dan perempuan hampir seimbang, meskipun laki-laki sedikit lebih tinggi. Sementara, pada jenjang SMP/sederajat dan perguruan tinggi perempuan memiliki persentase yang lebih tinggi. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan penyelesaian pendidikan antara jenis kelamin, terutama pada jenjang menengah pertama dan pendidikan tinggi, dengan perempuan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan.

Akses Internet terhadap Pendidikan

Di era digital yang perkembangannya kian pesat, internet menjadi salah satu sarana penting dalam mendukung keberlangsungan proses pembelajaran. Akses internet berperan penting dalam memperluas wawasan, informasi, serta peluang belajar yang lebih fleksibel dan mandiri bagi peserta didik. Selain sebagai sumber informasi, internet juga menunjang keterampilan digital yang kini menjadi bagian integral dalam dunia pendidikan.

Berikut adalah hasil dari SUSENAS yang menunjukkan pola sebaran peserta didik usia 5-24 tahun yang mengakses internet.

Gambar 3.12. Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2020-2024

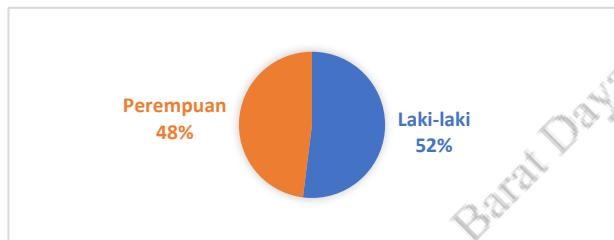


Sumber: SUSENAS Maret 2024

Grafik di atas menunjukkan tren peningkatan akses internet di kalangan peserta didik di usia 15-24 tahun di Kabupaten Sumba Barat Data selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, hanya 13,12 persen peserta didik yang mengakses internet. Persentase ini meningkat tajam di tahun 2021 menjadi 25,06 persen dan terus naik hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 36,72 persen, seiring dengan pandemi COVID-19 yang mendorong pembelajaran daring dan penggunaan teknologi digital. Meski terjadi penurunan pada tahun 2024 menjadi 34,97 persen, secara umum

tren ini mencerminkan bahwa akses internet di kalangan peserta didik terus mengalami peningkatan dan pergeseran perilaku belajar yang lebih fleksibel dengan memanfaatkan teknologi digital.

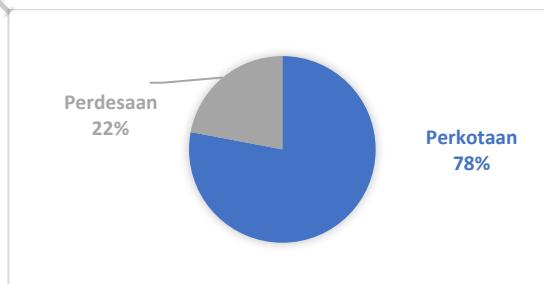
Gambar 3.13. Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: SUSENAS Maret 2024

Berdasarkan jenis kelamin, peserta didik usia 5–24 tahun di Kabupaten Sumba Barat Daya yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir pada pendataan SUSENAS Maret 2024 terdiri atas 52 persen laki-laki dan 48 persen perempuan. Meskipun persentase peserta didik laki-laki sedikit lebih tinggi, proporsi ini tergolong seimbang. Hal ini mengindikasikan bahwa akses terhadap internet relatif merata antara laki-laki dan perempuan, mencerminkan peluang yang hampir setara dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran.

Gambar 3.14. Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir menurut Wilayah di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: SUSENAS Maret 2024

Selain itu, berdasarkan tipe wilayahnya, peserta didik yang mengakses internet di wilayah perkotaan mencapai 78 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan yang hanya sebesar 22 persen. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan akses internet di wilayah perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan, peserta didik dapat dengan mudah mengakses internet karena adanya infrastruktur yang mendukung, jaringan lebih stabil, serta ketersediaan perangkat digital. Kurangnya peserta didik yang mengakses internet di pedesaan menandakan masih adanya ketimpangan infrastruktur dan akses informasi digital antara jenis wilayah.

BAB IV Ekonomi dan Tenaga Kerja



Infografik



72.698 orang

Angkatan kerja merupakan perempuan atau 43,99 persen dari total angkatan kerja



71.644 orang

Penduduk yang bekerja merupakan perempuan atau 44,45 persen dari total penduduk bekerja

PENDUDUK PEREMPUAN YANG BEKERJA SEMINGGU LALU MENURUT STATUS KEGIATAN

BERUSAHA SENDIRI

9.042 Orang

PEKERJA BEBAS DI PERTANIAN

0 Orang

BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP

8.800 Orang

PEKERJA BEBAS DI NON-PERTANIAN

119 Orang

BERUSAHA DIBANTU BURUH TETAP

0 Orang

PEKERJA BEBAS/ TIDAK DIBAYAR

40.948 Orang

BURUJ/KARYAWAN PEGAWAI

12.735 Orang



A. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam menilai kondisi sosial ekonomi di suatu wilayah. Partisipasi penduduk usia kerja dalam aktivitas perekonomian menjadi cerminan dari kualitas pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dinamika ketenagakerjaan hingga 2024 menunjukkan berbagai perkembangan dari segi jumlah angkatan kerja, tingkatan partisipasi kerja, struktur lapangan usaha, hingga indikator lainnya.

Di tengah perubahan struktur ketenagakerjaan yang terjadi, kontribusi perempuan menjadi salah satu penentu arah pembangunan sosial ekonomi sehingga peranan perempuan tidak dapat diabaikan. Perempuan memiliki peran sentral dan potensial untuk mendorong perubahan ekonomi dan sosial. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2016) menyatakan perempuan yang berusaha atau memiliki kontribusi ekonomi di sektor informal dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan secara agregat.

**Gambar 4.1. Konsep Ketenagakerjaan menurut
International Conference of Labour Statisticians (ICLS) 13**



Untuk memahami dinamika ini lebih lanjut, penting untuk merujuk pada kerangka konseptual ketenagakerjaan yang digunakan secara internasional. Konsep dasar *International Conference of Labour Statisticians* (ICLS) 13 membagi penduduk menjadi 2 kelompok yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah semua penduduk yang berada dalam rentang usia kerja yaitu berusia 15 tahun ke atas. Penduduk Usia kerja dibagi lagi menjadi dua kelompok besar yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk yang bekerja, memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Seorang yang dapat digolongkan bekerja ketika dalam satu minggu melakukan

kegiatan ekonomi sekurang-kurangnya satu jam untuk memperoleh dan membantu memperoleh upah, penghasilan, atau keuntungan (BPS, 2024). Sementara itu, Pengangguran adalah mereka yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan secara aktif, dan siap bekerja bila ada pekerjaan.

Gambar 4.2. Jumlah Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021-2024



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

Pada gambar 4.2 terlihat bahwa dari tahun 2021 hingga 2024, jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami fluktuasi, dengan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dan penurunan cukup tajam pada tahun 2023. Secara umum, laki-laki masih mendominasi penduduk usia kerja. Tahun 2024, jumlah laki-laki usia kerja mencapai 107.285 orang, sementara perempuan sebanyak 102.714 orang. Meskipun laki-laki masih lebih banyak, selisihnya relatif kecil. Artinya, perempuan memiliki jumlah yang hampir seimbang dengan laki-laki dalam hal potensi tenaga kerja.

Gambar 4.3. Jumlah Angkatan dan Bukan Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021-2024



Sumber: BPS, Survei Angkatan kerja Nasional (SAKERNAS)

Jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja pada gambar 4.3 selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan adanya perbedaan yang konsisten antara laki-laki dan perempuan. Jumlah laki-laki yang tergolong dalam angkatan kerja secara konsisten lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2021, jumlah angkatan kerja laki-laki tercatat sebanyak 104.501 orang, sementara perempuan sebanyak 85.978 orang. Tren ini terus berlanjut hingga tahun 2024, dimana laki-laki mencapai 92.564 orang dan perempuan sebanyak 72.698 orang. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa laki-laki memiliki tingkat partisipasi yang lebih besar dalam aktivitas ekonomi dibandingkan perempuan.

Sebaliknya, jumlah perempuan yang tergolong dalam kategori bukan angkatan kerja jauh lebih besar dibandingkan laki-laki di setiap tahunnya. Misalnya, pada tahun 2022, jumlah perempuan yang tidak masuk dalam angkatan kerja mencapai 33.359 orang, hampir dua kali lipat lebih banyak dibandingkan laki-laki yang hanya berjumlah 19.535 orang. Pola serupa juga terlihat pada tahun 2024, dimana perempuan yang bukan angkatan kerja tercatat sebanyak 30.016 orang, sedangkan laki-laki hanya 14.721 orang. Kondisi ini menggambarkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan struktural maupun sosial dalam mengakses pasar kerja, seperti beban pekerjaan domestic/rumah tangga, norma sosial, atau keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan.

Gambar 4.4. Jumlah Penduduk Bekerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021-2024

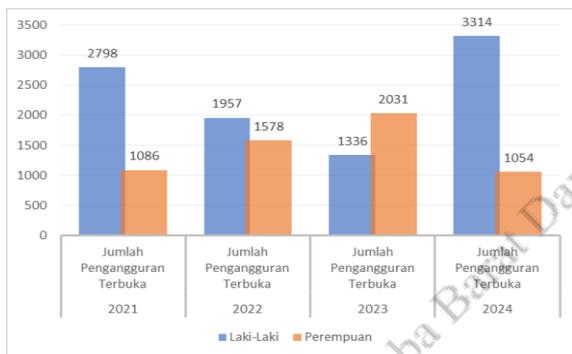


Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

Gambar 4.4 menunjukkan sejak tahun 2021 hingga 2024, jumlah penduduk laki-laki yang bekerja selalu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang bekerja. Perbedaan terbesar antara laki-laki dan perempuan terjadi pada tahun 2022 dengan selisih 20.112 orang (97.959 laki-laki dan 77.847 perempuan). Meskipun sempat mengalami penurun selama 2021-2023, angka tersebut kembali mengingkat baik pada laki-laki maupun perempuan pada 2024. Jumlah laki-

laki bekerja meningkat menjadi 89.250 orang, sementara perempuan mencapai 71.644 orang.

Gambar 4.5. Jumlah Pengangguran menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021-2024



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

Jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki pola yang mirip dengan jumlah penduduk bekerja. Gambar 4.5 menunjukkan bahwa sejak tahun 2021 hingga 2022, jumlah pengangguran terbuka laki-laki cenderung lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun pada tahun 2023, terjadi pola yang berbeda, dengan pengangguran terbuka didominasi oleh perempuan sebanyak 2.031 orang sedangkan laki-laki sebanyak 1.336 orang. Pada tahun 2024, terjadi perubahan pola lagi, dengan laki-laki kembali mendominasi angka pengangguran terbuka.

Selain itu, pada tahun 2021 hingga 2023, angka tersebut pada laki-laki mengalami tren penurunan, sebelum mengalami lonjakan drastis sebanyak 1.978 orang dari tahun sebelumnya (3.314 orang pada tahun 2024). Sebaliknya pada Perempuan, terjadi peningkatan pada tiga tahun pertama sebelum akhirnya mengalami penurunan sebanyak 977 orang pada tahun 2024 (1.054 orang).

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK digunakan sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana penduduk usia kerja berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja.

$$TPAK = \left(\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \right) \times 100\%$$

Tabel 4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut jenis kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021-2024

Jenis Kelamin	TPAK			
	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-Laki	89.19	83.65	86.04	86.28
Perempuan	77.17	70.42	74.00	70.78

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

Dari tahun 2021 hingga 2024, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. TPAK laki-laki secara konsisten lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini mencerminkan dominasi laki-laki pada pasar tenaga kerja di Kabupaten Sumba Barat Daya. Tabel 4.1 menunjukkan bahwa TPAK tahun 2021 laki-laki mencapai 89.19 persen dan perempuan berada pada 77.17 persen. Pada tahun 2022, TPAK perempuan menunjukkan penurunan yang signifikan, mencapai 70.42 persen, yang merupakan titik terendah dalam tahun 2021-2024. Penurunan pada TPAK perempuan tidak berlanjut secara konsisten. Pada tahun 2023, TPAK perempuan kembali meningkat menjadi 74.00 persen namun mengalami penurunan kembali menjadi 70.78 pada tahun 2024. Berbeda dengan perempuan, TPAK laki-laki mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 83.65 persen dari 89.19 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2023 – 2024, TPK laki-laki terus mengalami peningkatan hingga mencapai 86.28 persen pada tahun 2024.

Gambar 4.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2021-2024



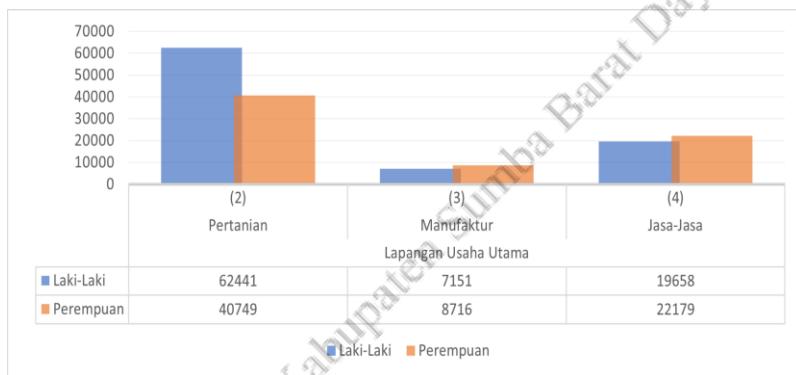
Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang menggambarkan persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. Pengangguran terbuka mencakup individu yang tidak bekerja, sedang mencari

pekerjaan dan tersedia untuk bekerja (BPS, 2024). Gambar 4.6 menunjukkan bahwa TPT mengalami fluktuasi selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, TPT tercatat sebesar 2,04 persen dan mengalami penurunan menjadi 1,97 persen di tahun 2022. Namun, tren ini tidak berlanjut, karena pada tahun 2023 angka TPT kembali meningkat menjadi 2,08 persen. Puncaknya terjadi pada tahun 2024, dimana TPT melonjak signifikan menjadi 2,64 persen.

B. Aktivitas Ekonomi

Gambar 4.7. Pekerja menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Sumba Barat Daya, Agustus 2024



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2024

Berdasarkan Gambar 4.7, sektor pertanian masih didominasi oleh pekerja laki-laki. Tercatat sebanyak 62.441 laki-laki bekerja di sektor ini, jauh lebih banyak dibandingkan perempuan yang berjumlah 40.749 orang. Data ini menunjukkan bahwa pertanian tetap menjadi lapangan kerja utama bagi laki-laki, kemungkinan karena pekerjaan di sektor ini menuntut kekuatan fisik atau karena faktor sosial-budaya yang mendorong laki-laki lebih aktif dalam kegiatan pertanian.

Berbeda dengan sektor pertanian, sektor manufaktur justru menunjukkan dominasi tenaga kerja perempuan. Jumlah perempuan yang bekerja di sektor ini mencapai 8.716 orang, lebih banyak dibandingkan laki-laki yang hanya 7.151 orang. Hal ini menandakan bahwa sektor manufaktur, terutama sub-sektor seperti tekstil dan makanan, cenderung lebih terbuka atau menarik bagi perempuan, baik karena karakteristik pekerjaan yang lebih sesuai maupun karena akses peluang kerja yang lebih setara.

Di sektor jasa-jasa, perempuan juga mencatat angka yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sebanyak 22.179 perempuan bekerja di sektor ini, melampaui

jumlah laki-laki yang mencapai 19.658 orang. Keterlibatan perempuan yang lebih tinggi di sektor jasa menunjukkan adanya kecenderungan perempuan memilih atau lebih mudah masuk ke pekerjaan di bidang perdagangan, pendidikan, dan layanan sosial, yang mungkin menawarkan fleksibilitas, lingkungan kerja yang lebih ramah, atau peluang yang lebih relevan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman mereka. Secara keseluruhan, meskipun laki-laki masih unggul di sektor pertanian, perempuan menunjukkan partisipasi yang lebih tinggi di sektor manufaktur dan jasa.

Sebagai informasi tambahan, data pendukung pertanian seperti data kelompok penerima bantuan/hibah ternak, data kelompok tani menurut jenis kelompok dan kecamatan, data jumlah kelompok nelayan, dan data pendukung manufaktur seperti jumlah peserta pelatihan industri rumahan menurut jenis kelamin terdapat pada bagian lampiran di halaman akhir publikasi ini.

Tabel 4.2. Penduduk Bekerja Seminggu yang Lalu menurut Status Kegiatan di Kabupaten Sumba Barat Daya, Agustus 2024

Jenis Kelamin	Berusaha Sendiri	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	Berusaha dibantu buruh tetap	Buruh/Karyawan/Pegawai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	8547	39908	1108	13158
Perempuan	9042	8800	0	12735

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2024

Tabel 4.2. Penduduk Bekerja Seminggu yang Lalu menurut Status Kegiatan di Kabupaten Sumba Barat Daya, Agustus 2024 (lanjutan)

Jenis Kelamin	Pekerja bebas di Pertanian	Pekerja Bebas di non-Pertanian	Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar
(1)	(6)	(7)	(8)
Laki-laki	0	2449	24080
Perempuan	0	119	40948

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), 2024

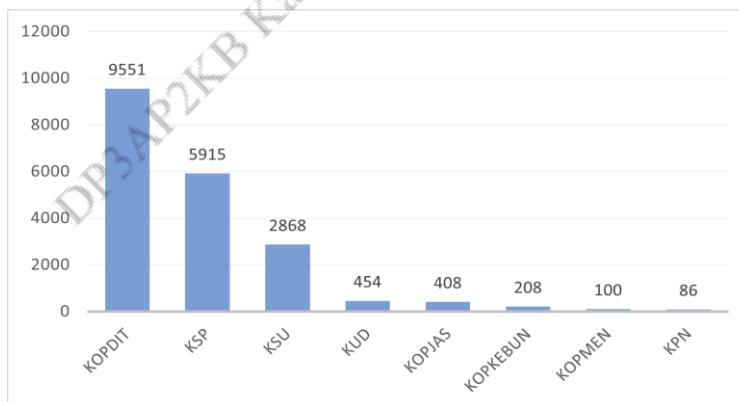
Berdasarkan Tabel 4.2, terdapat perbedaan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan dalam hal jenis keterlibatan kerja pada tahun 2024. Laki-laki paling banyak bekerja pada kategori *berusaha dibantu buruh tidak tetap*, yaitu sebanyak 39.908 orang. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan dalam kategori yang sama, yaitu hanya 8.800 orang. Laki-laki juga lebih dominan pada kategori

buruh/karyawan/pegawai dan *pekerja bebas di non-pertanian*, meskipun selisihnya lebih kecil dibandingkan kategori sebelumnya. Sebaliknya, perempuan sangat mendominasi dalam kategori *pekerja keluarga/tidak dibayar*, dengan jumlah mencapai 40.948 orang, dibandingkan laki-laki sebanyak 24.080 orang.

Sementara itu, pada kategori *berusaha sendiri* dan *buruh/karyawan/pegawai*, proporsi laki-laki dan perempuan relatif seimbang, masing-masing menunjukkan partisipasi aktif dalam sektor usaha mikro dan pekerjaan formal. Hasil estimasi yang bernilai nol yang terjadi pada perempuan *berusaha sendiri dibantu buruh tetap* dan *pekerja bebas di pertanian*, meskipun secara empiris fenomenanya terlihat jelas di lapangan, sering kali disebabkan oleh tidak adanya responden dari kelompok tersebut di wilayah yang tercakup dalam sampel. Sehingga dalam konteks ini, nilai nol bukan berarti fenomena tidak terjadi, melainkan estimasi tidak memiliki cukup bukti statistik untuk mengafirmasi keberadaannya, atau jumlahnya sangat sedikit. Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa laki-laki cenderung lebih banyak terlibat dalam usaha dengan skala lebih besar dan dibayar, sedangkan perempuan lebih banyak terserap dalam pekerjaan tidak dibayar.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan kekeluargaan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). Koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat sekitarnya, terutama dalam skala lokal.

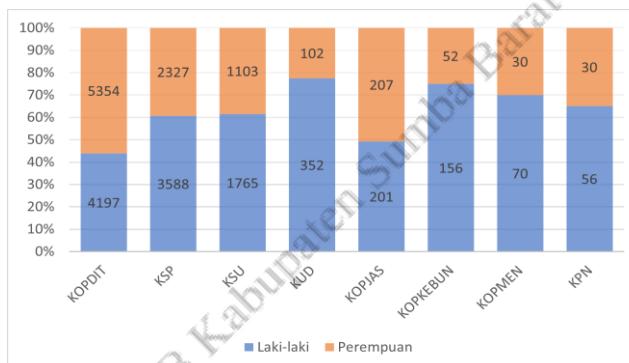
Gambar 4.8. Jumlah Anggota Koperasi menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Sumba Barat Daya, Desember 2024



Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumba Barat Daya

Berdasarkan gambar 4.8, jenis koperasi yang paling dominan adalah Koperasi Kredit (KOPDIT) dengan jumlah anggota mencapai 9.551 orang, yang menunjukkan peran besar koperasi ini dalam layanan keuangan mikro. Angka ini diikuti oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan anggota sebanyak 5.915 orang, yang juga berperan besar dalam menyediakan akses permodalan. Jenis koperasi lainnya yang jumlah anggotanya juga cukup besar (2.868 orang) adalah Koperasi Serba Usaha, yang memberikan fleksibilitas bagi usaha di berbagai sektor. Sementara itu, koperasi lain seperti KUD (454 orang), KOPJAS (408 orang), dan KOPKEBUN (208 orang) memiliki jumlah anggota yang relatif kecil, namun tetap memiliki peran tersendiri sesuai sektor masing-masing. Jenis koperasi yang paling sedikit jumlah anggotanya adalah KPN (86 unit) dan KOPMEN (100 unit).

Gambar 4.9. Jumlah Anggota Koperasi menurut Jenis Kelamin dan Jenis Koperasi di Kabupaten Sumba Barat Daya, Desember 2024



Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumba Barat Daya

Berdasarkan Gambar 4.9, terlihat bahwa laki-laki masih mendominasi keanggotaan pada sebagian besar jenis koperasi. Pada KOPDIT, jumlah anggota terbagi menjadi 4.197 laki-laki dan 5.354 perempuan, menjadikan KOPDIT sebagai salah satu jenis koperasi di mana jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan keterlibatan aktif perempuan dalam kegiatan simpan pinjam berbasis kredit yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Sementara itu, koperasi lain seperti KSP dan KSU menunjukkan dominasi laki-laki, masing-masing dengan jumlah anggota 3.588 laki-laki dan 2.327 perempuan untuk KSP, dan 1.765 laki-laki dan 1.103 perempuan untuk KSU. Secara umum, pola ini menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan perempuan dalam koperasi cukup tinggi di beberapa jenis koperasi seperti KOPDIT dan KOPJAS, namun laki-laki masih mendominasi dalam struktur keanggotaan koperasi, terutama pada koperasi yang bergerak di sektor konsumsi, jasa, dan perkebunan.

Dalam struktur organisasi koperasi, Manajer bertanggung jawab atas pengelolaan operasional harian koperasi dan pelaksanaan program kerja. Karyawan adalah tenaga kerja yang melaksanakan fungsi teknis dan administratif sesuai arahan manajemen. Sementara itu, Pengurus merupakan pimpinan koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota untuk merumuskan kebijakan strategis dan mewakili koperasi secara hukum. Adapun Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi koperasi, termasuk kinerja pengurus dan manajemen.

Tabel 4.3. Jumlah Manager dan Karyawan menurut Jenis Kelamin dan Jenis Koperasi di Kabupaten Sumba Barat Daya, Desember 2024

Koperasi	Manager		Karyawan	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KOPDIT	3	0	24	22
KSP	74	24	19	27
KSU	9	4	34	32
KUD	5	0	7	5
KOPJAS	4	5	0	0
KOPKEBUN	1	0	5	2
KOPMEN	0	0	0	0
KPN	0	0	1	0
Total	96	33	90	88

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumba Barat Daya

Berdasarkan tabel 4.3, jumlah manajer koperasi sebanyak 129 orang, terdiri dari 96 laki-laki dan 33 perempuan. Jumlah karyawan secara keseluruhan tercatat sebanyak 178 orang, dengan komposisi 90 laki-laki dan 88 perempuan, menunjukkan keseimbangan gender yang cukup baik di level operasional.

Tabel 4.4. Jumlah Pengurus dan Pengawas menurut Jenis Kelamin dan Jenis Koperasi di Kabupaten Sumba Barat Daya, Desember 2024

Koperasi	Pengurus		Pengawas	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KOPDIT	38	8	17	6
KSP	304	40	296	33
KSU	90	42	87	18
KUD	9	0	9	0
KOPJAS	26	33	41	19
KOPKEBUN	9	0	9	0
KOPMEN	8	7	6	6
KPN	9	0	9	0
Total	493	130	474	82

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumba Barat Daya

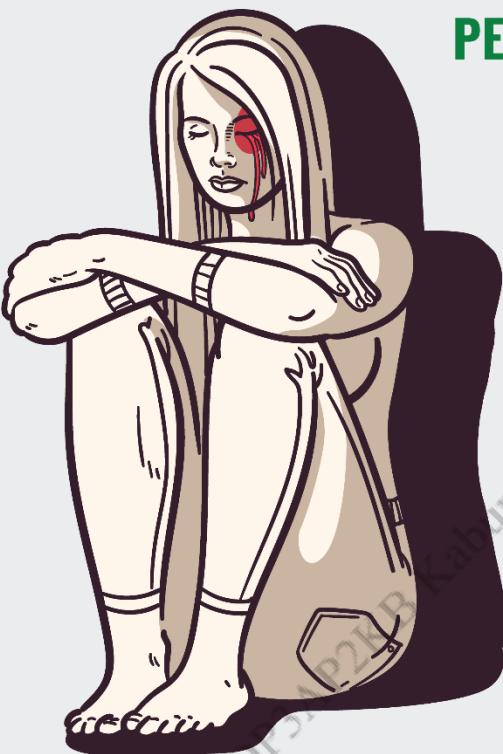
Pada tabel 4.4, untuk jabatan pengurus, tercatat 623 orang, terdiri dari 493 laki-laki dan 130 perempuan, menunjukkan dominasi laki-laki dalam struktur kepengurusan. Sementara itu, jabatan pengawas diisi oleh 556 orang, dengan 474 laki-laki dan 82 perempuan. Data ini mencerminkan bahwa secara umum, laki-laki masih lebih dominan dalam posisi strategis di koperasi, terutama sebagai pengurus dan pengawas, meskipun partisipasi perempuan juga mulai terlihat khususnya di level karyawan, dan sebagian bisa menjabat sebagai manajer.

DP3AP2KB Kabupaten Sumba Barat Daya



Infografik

KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK¹



7
Kasus

Kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada tahun 2024

15
Kasus

Kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada tahun 2024

Aparatur Sipil Negara (ASN)²



56,90%

Pengawai Negeri Sipil merupakan perempuan



57,55%

Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan perempuan

DP3AP2KB Kabupaten Sumba Barat Daya

A. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

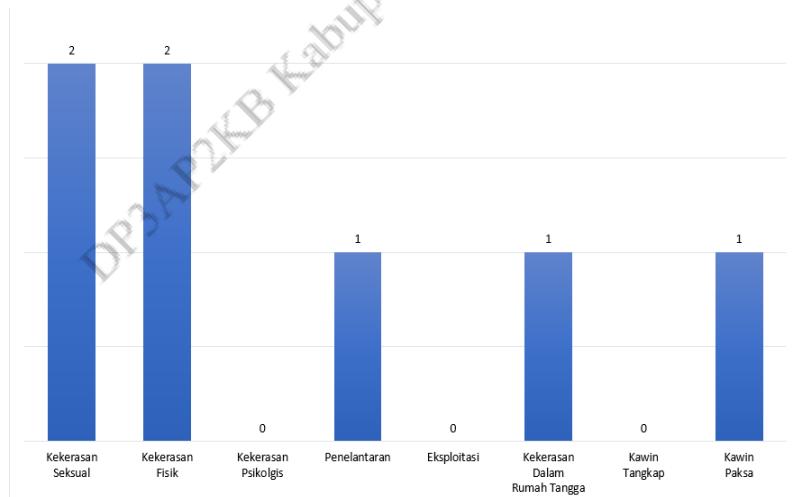
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan adalah tindakan atau ancaman yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap orang lain, yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan luka fisik, penderitaan psikologis, kerugian ekonomi, atau bahkan kematian. Kekerasan dapat bersifat fisik, verbal, seksual, psikologis, maupun berbentuk penelantaran dan pengabaian.

Kekerasan bisa dialami oleh siapa saja, tetapi perempuan cenderung lebih rentan menjadi korban. Beberapa faktor penyebab kerentanan ini antara lain adalah budaya patriarki, di mana laki-laki dianggap lebih berkuasa dalam keluarga, sehingga kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri sering dianggap sebagai bentuk “pendisiplinan”. Selain itu, perempuan juga kerap diposisikan sebagai objek seksual, baik dalam iklan, media sosial, maupun budaya populer, yang meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan.

Berikut ini ditampilkan data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada tahun 2024, berdasarkan sumber dari UPTD PPA Kabupaten Sumba Barat Daya.

Gambar 5.1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaporkan di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: UPTD PPA Kabupaten Sumba Barat Daya

Secara total terdapat 7 kasus yang dilaporkan. Jika dilihat dari jenis kekerasannya, terdapat 2 kasus kekerasan seksual, 2 kasus kekerasan fisik, 1 kasus penelantaran, 1 kasus KDRT dan 1 kasus kawin paksa. Meskipun demikian, data ini belum mencerminkan angka kasus yang sebenarnya karena masih banyak kasus yang tidak dilaporkan. Tetapi, data ini tetap memberikan gambaran awal mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Sama halnya dengan perempuan, anak juga merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan. Kerentanan ini terjadi terutama disebabkan oleh keterbatasan anak dalam mengenali resiko, membela diri, dan menyuarakan kekerasan yang mereka alami. Kondisi ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa pelaku kekerasan sering berasal dari lingkungan terdekat, seperti orang tua, keluarga, teman sebaya, bahkan guru di sekolah.

Berikut ini data mengenai kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada tahun 2024, berdasarkan data dari UPTD PPA Kabupaten Sumba Barat Daya

Gambar 5.2. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: UPTD PPA Kabupaten Sumba Barat Daya

Secara total, terdapat 15 kasus yang dilaporkan. Jika dilihat berdasarkan jenis kasusnya, kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan paling dominan dengan total 12 kasus yang seluruhnya dialami oleh anak perempuan. Angka ini diikuti oleh kekerasan fisik yang dilaporkan sebanyak tiga kasus dengan rincian dua korban adalah anak perempuan dan satu korban anak laki-laki. Selanjutnya, tercatat sebanyak satu kasus kekerasan psikologis yang korbannya adalah perempuan. Jika kita lihat lebih

lanjut, kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada tahun 2024 hampir seluruhnya korbannya Adalah Perempuan, yaitu 14 dari 15 kasus yang dilaporkan.

Data ini menunjukkan bahwa anak perempuan sangat rentan mengalami kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Meskipun data ini hanya mencakup kasus yang dilaporkan secara resmi, dan belum tentu mencerminkan seluruh kasus yang terjadi di lapangan, namun tetap memberikan indikasi penting tentang pola jenis kekerasan yang perlu diwaspadai.

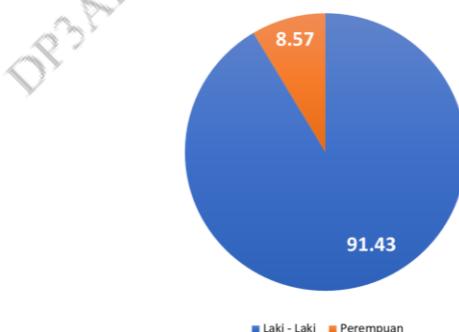
Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran dan edukasi publik terkait kekerasan terhadap anak, baik melalui sekolah, keluarga, maupun media. Selain itu, mekanisme pelaporan dan pendampingan korban juga perlu diperkuat, agar anak-anak yang mengalami kekerasan tidak merasa takut atau malu untuk melapor.

B. Politik dan Pengambilan Keputusan

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD adalah Lembaga legislatif di tingkat daerah yang secara umum kewenangannya adalah membuat dan menetapkan peraturan daerah bersama kepala daerah. Partisipasi perempuan dalam lembaga ini merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat keterwakilan gender dalam proses pengambilan keputusan publik. Tidak hanya itu, keberadaan atau partisipasi perempuan di lembaga legislatif juga berpengaruh terhadap penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap isu-isu yang berdampak pada perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

Gambar 5.3. Proporsi Anggota DPRD menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat Daya

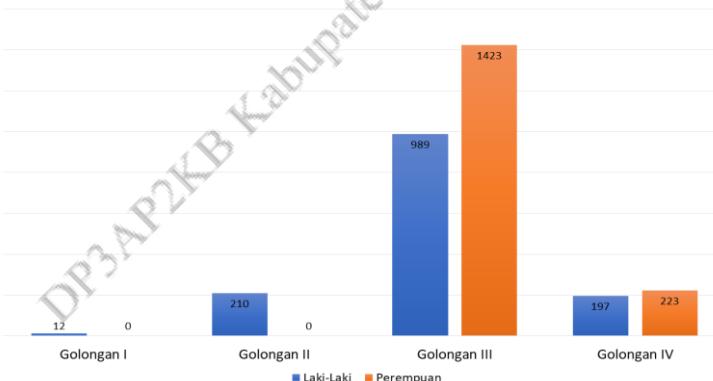
Gambar 5.3 menyajikan data jumlah anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2024–2029. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keterwakilan laki-laki dan perempuan dalam lembaga legislatif daerah. Berdasarkan gambar tersebut, proporsi perempuan dalam anggota dewan hanya mencapai 8,57 persen. Jumlah ini masih jauh dari target minimal sebesar 30 persen. Rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD menunjukkan tantangan yang masih dihadapi dalam mendorong partisipasi politik Perempuan, mulai dari pengkaderan, pencalonan, hingga keterpilihan dalam pemilu.

PNS Menurut Golongan

Golongan PNS menunjukkan perkembangan karier ASN/PNS berdasarkan masa kerja dan prestasi. Golongan dibagi menjadi 4 kelompok utama yaitu Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV. Setiap golongan memiliki subkelas dari A sampai E.

Berikut ini ditampilkan grafik distribusi PNS menurut Golongan dan jenis kelamin untuk menggambarkan secara terstruktur bagaimana perempuan mendapatkan akses yang setara khususnya dalam birokrasi pemerintahan.

Gambar 5.4. Distribusi PNS menurut Golongan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

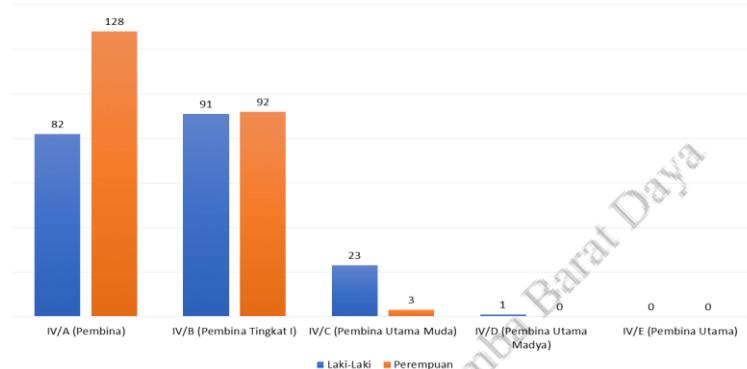


Sumber: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sumba Barat Daya

Berdasarkan gambar, terlihat bahwa mayoritas PNS berada pada golongan III yaitu sebesar 73,8 persen dari total PNS. Jika kita lihat berdasarkan jenis kelamin, Golongan III dan Golongan IV lebih banyak diisi oleh perempuan. Pada golongan III proporsi perempuan sebanyak 58,99 persen sedangkan pada Golongan IV sebanyak 53,09 persen. Hal ini menunjukkan bahwa PNS perempuan lebih banyak mendominasi pada Golongan III dan IV.

Grafik selanjutnya, menunjukkan distribusi PNS Golongan IV menurut subkelasnya.

Gambar 5.5. Distribusi PNS Golongan IV menurut Subkelasnya di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sumba Barat Daya

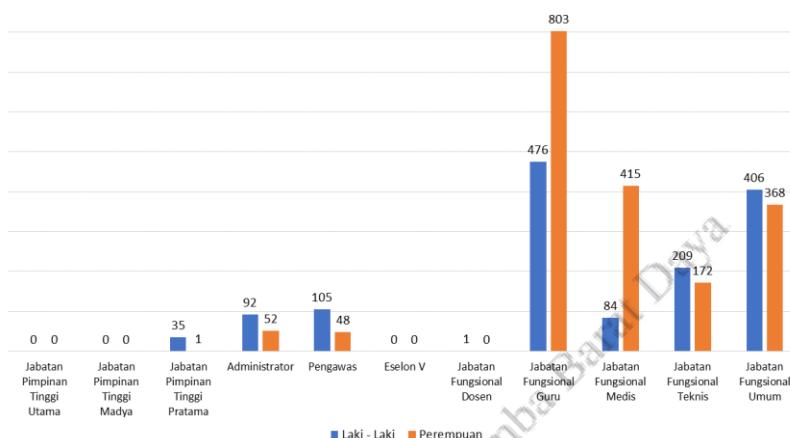
Berdasarkan grafik di atas, pada subkelas IV A dan IV B, proporsi perempuan dan laki-laki masih cukup seimbang. Tetapi, proporsi atau keterwakilan perempuan menurun tajam pada subkelas yang lebih tinggi. Pada subkelas IV C, dari 26 PNS pada subkelas ini, hanya 3 diantaranya yang perempuan. Selanjutnya, pada subkelas IV D, tidak ada keterwakilan perempuan. Berdasarkan data ini, ada indikasi bahwa semakin tinggi jenjang kepangkatan PNS, semakin kecil peluang perempuan untuk menjangkaunya.

PNS Menurut Jabatan

Pembagian Jabatan dalam birokrasi umumnya mencakup jabatan struktural dan jabatan fungsional. Distribusi PNS menurut jabatan dan jenis kelamin dapat menjadi tolak ukur untuk melihat sejauh mana perempuan mendapatkan akses ke jabatan-jabatan strategis di pemerintahan.

Berikut ini ditampilkan grafik distribusi PNS menurut jabatan dan jenis kelamin. Penyajian ini bertujuan untuk melihat perbedaan representasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai jenjang jabatan di lingkungan PNS.

Gambar 5.6. Distribusi PNS Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sumba Barat Daya

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa PNS perempuan lebih mendominasi pada jabatan-jabatan fungsional di bidang Pendidikan dan Kesehatan. Pada jabatan fungsional guru, 62,78 persen diisi oleh Perempuan, bahkan pada jabatan fungsional medis, 83,16 persen diisi oleh perempuan.

Selanjutnya untuk jabatan pimpinan tinggi, dari total 36 PNS yang menduduki jabatan tersebut, hanya ada satu perempuan atau setara dengan 2,8 persen. Jabatan administrator dan pengawas juga masih didominasi oleh laki-laki dengan persentase berturut-turut sebesar 63,88 dan 68,27 persen.

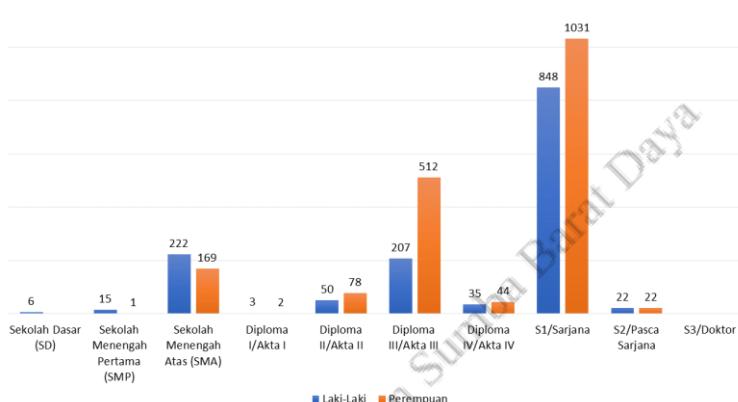
Kondisi ini mencerminkan bahwa perempuan berperan besar pada sektor-sektor yang berkaitan dengan pelayanan publik khususnya bidang Pendidikan dan kesehatan. Namun, akses perempuan terhadap jabatan strategis masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendorong keterwakilan perempuan pada jabatan-jabatan strategis tersebut.

PNS Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan merupakan salah satu indikator untuk menilai kualitas sumber daya manusia khususnya di sektor pemerintahan. Tingkat Pendidikan tidak hanya berperan dalam peningkatan kompetensi suatu individu tetapi juga berperan penting dalam jenjang karier seseorang sebagai PNS.

Berikut ini ditampilkan grafik distribusi PNS menurut tingkat Pendidikan dan jenis kelamin. Indikator ini ditampilkan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender khususnya pada akses terhadap jenjang Pendidikan yang lebih tinggi di kalangan PNS.

Gambar 5.7. Distribusi PNS menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sumba Barat Daya

Berdasarkan gambar berikut, dapat dilihat bahwa distribusi PNS terbanyak pada tingkat Pendidikan S1/Sarjana yaitu 57,51 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jenjang pendidikan diploma II hingga S1/Sarjana lebih didominasi oleh PNS perempuan dengan persentase secara berturut-turut sebesar 60,93 persen, 71,21 persen, 55,69 persen, dan 54,86 persen. Keseimbangan antara kedua kelompok hanya terlihat pada tingkat pendidikan S2/pasca sarjana.

Capaian ini mengindikasikan bahwa PNS perempuan memiliki kualifikasi akademik yang lebih baik dibandingkan laki-laki. Mengingat jenjang Pendidikan merupakan salah satu syarat utama untuk kenaikan jabatan atau perkembangan karier, tingginya pendidikan formal di kalangan PNS perempuan harusnya menjadi modal penting untuk mendukung keterlibatan mereka pada jabatan strategis.

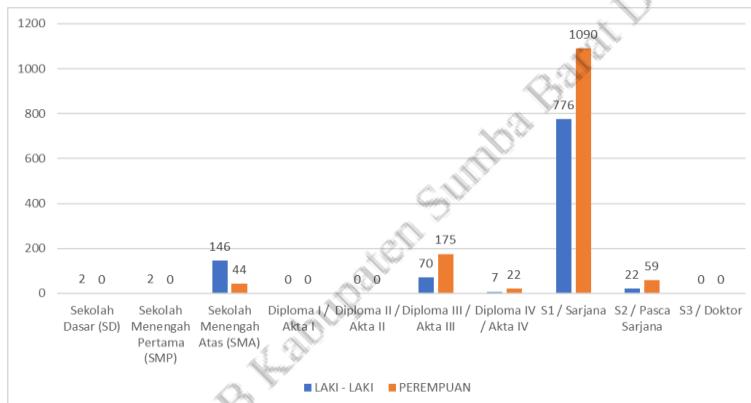
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Tingkat Pendidikan

Selain PNS, kategori lain dalam ASN adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meskipun berbeda dalam hal status kepegawaian dan pola karier, keduanya memiliki peran yang sama penting dalam mendukung kinerja pemerintahan. Tingkat pendidikan pada PPPK juga menjadi indikator penting untuk

menilai kualitas sumber daya manusia, karena pendidikan yang lebih tinggi dapat menunjang kompetensi serta pengembangan diri pegawai. Seperti halnya pada PNS, distribusi PPPK menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin ditampilkan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender, khususnya dalam akses terhadap pendidikan formal yang lebih tinggi.

Untuk itu, pada bagian berikut ditampilkan distribusi PPPK menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin guna mengidentifikasi potensi kesenjangan gender, khususnya dalam akses terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi di kalangan PPPK.

Gambar 5. 8. Distribusi PPPK menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: Badan Kependidikan Daerah (BKD) Kabupaten Sumba Barat Daya

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa distribusi PPPK terbanyak berada pada tingkat pendidikan S1/Sarjana, yaitu sebesar 77,27 persen. Jika dirinci menurut jenis kelamin, perempuan mendominasi hampir di seluruh jenjang pendidikan tinggi. Pada jenjang S2, proporsi perempuan mencapai 72,83 persen, pada S1 sebesar 58,41 persen, pada Diploma IV sebesar 75,86 persen, dan pada Diploma III sebesar 71,42 persen. Sebaliknya, jenjang pendidikan yang lebih rendah masih didominasi oleh laki-laki, yaitu pada jenjang SMA sebesar 76,84 persen, serta pada jenjang SMP dan SD masing-masing 100 persen.

Dari sisi gender, data ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa PPPK perempuan memiliki akses yang lebih besar pada jenjang pendidikan tinggi dibandingkan laki-laki. Sebaliknya, PPPK laki-laki cenderung lebih banyak berada pada jenjang pendidikan menengah ke bawah. Pola ini mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di kalangan PPPK relatif lebih unggul dari

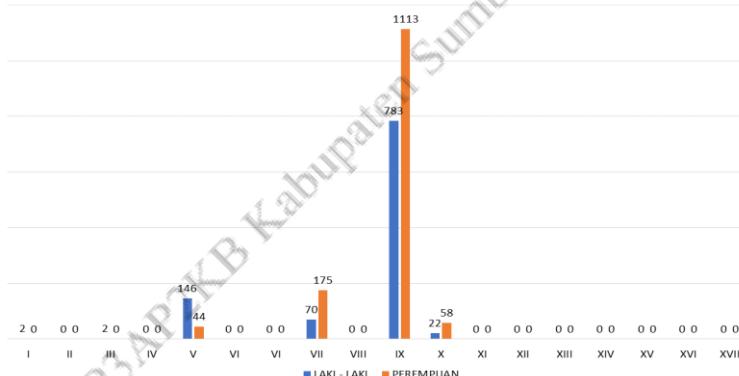
sisi pendidikan formal, yang berpotensi memberi peluang lebih besar dalam hal kompetensi dan pengembangan karier.

PPPK Menurut Pangkat/Golongan

Seperi halnya pada PNS, distribusi PPPK juga dapat dianalisis menurut pangkat atau golongan. Meskipun mekanisme pengaturan karier PPPK berbeda, informasi ini tetap penting untuk melihat komposisi pegawai serta potensi kesenjangan gender di tiap golongan. Dengan demikian, analisis pangkat/golongan pada PPPK dapat memberikan gambaran mengenai posisi perempuan dan laki-laki dalam struktur kepegawaian.

Berikut ini ditampilkan distribusi PPPK menurut pangkat/golongan dan jenis kelamin untuk memberikan gambaran mengenai keterwakilan laki-laki dan perempuan dalam struktur kepegawaian.

Gambar 5.9. Distribusi PPPK menurut Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sumba Barat Daya

Berdasarkan gambar, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, Distribusi PPPK di Kabupaten Sumba Barat Daya hanya tersebar pada enam golongan, yaitu I, III, V, VII, IX, dan X. Dari keseluruhan, golongan IX merupakan yang paling dominan dengan proporsi 86,9 persen, diikuti oleh golongan VII sebesar 11,2 persen, golongan V sebesar 8,7 persen, serta golongan X sebesar 3,6 persen. Sementara itu, golongan I dan III hanya menyumbang masing-masing sebesar 0,1 persen.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, perempuan mendominasi pada sebagian besar golongan menengah hingga tinggi. Pada golongan IX, perempuan mencapai 58,7 persen, golongan VII 71,4 persen, dan golongan X 72,5 persen. Sebaliknya, pada

golongan V, laki-laki lebih dominan yaitu mencapai 76,8 persen. Di sisi lain, golongan I dan III seluruhnya ditempati oleh laki-laki.

Distribusi PPPK menurut pangkat/golongan menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak menempati golongan menengah hingga tinggi, sementara laki-laki dominan pada golongan rendah. Hal ini mencerminkan keterkaitan antara pendidikan dan posisi jabatan, di mana akses pendidikan yang lebih tinggi memberi peluang lebih besar bagi perempuan untuk mencapai golongan lebih baik. Temuan ini menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan dan pengembangan kapasitas guna mendorong tercapainya kesetaraan gender dalam jenjang karier.

BAB VI Sosial

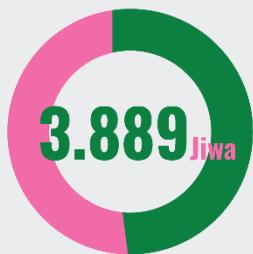
Infografik



ANAK USIA 0-18 TAHUN
PENERIMA PKH

33.598 Anak

LANSIA TERLANTAR



48%
LAKI - LAKI

52%
PEREMPUAN

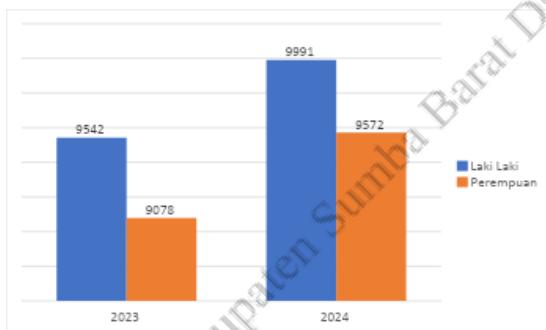


A. Penduduk Lanjut Usia

Populasi Penduduk Lansia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lanjut usia (lansia) didefinisikan sebagai seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Kelompok lansia merupakan bagian penting dalam struktur penduduk karena memiliki kebutuhan dan tantangan tersendiri, yang dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Gambar 6.1. Jumlah Penduduk Usia 60 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2023-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat Daya

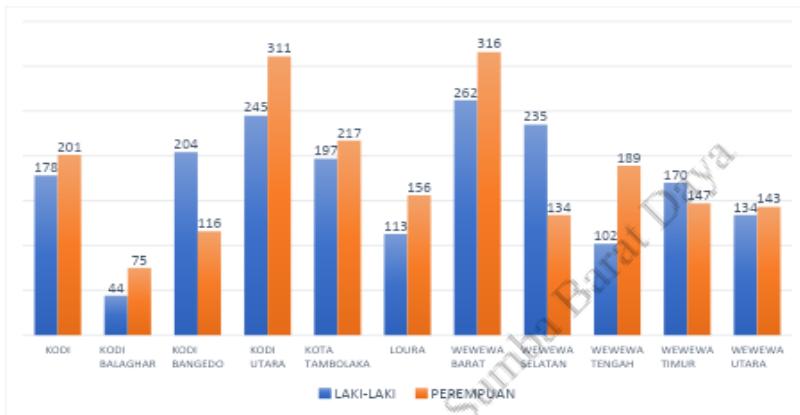
Pada tahun 2023 dan 2024, jumlah lansia menunjukkan tren peningkatan, dengan jumlah lansia laki-laki masih sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2023, proporsi laki-laki lansia sebesar 51,25 persen dan perempuan 48,75 persen. Tahun 2024, komposisi ini tetap hampir seimbang, dengan laki-laki sebesar 51,05 persen dan perempuan 48,95 persen. Meskipun demikian, pertumbuhan lansia perempuan tercatat sedikit lebih tinggi (5,4%) dibanding laki-laki (4,7%), yang mengindikasikan bahwa ke depan, jumlah lansia perempuan berpotensi terus meningkat dan memerlukan perhatian khusus dalam penyusunan kebijakan perlindungan sosial dan pelayanan publik di usia lanjut.

Penduduk Lansia Terlantar

Dalam kerangka perlindungan sosial, lanjut usia terlantar adalah kelompok yang sangat rentan dan perlu perhatian khusus. Berdasarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2012, Lanjut Usia Terlantar adalah orang yang berusia 60 tahun ke atas dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya karena berbagai faktor, seperti kondisi fisik,

ekonomi, atau sosial. Karena itu, mereka perlu dilindungi melalui kebijakan yang tepat agar tetap bisa hidup layak.

Gambar 6.2. Jumlah Lansia Terlantar menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya

Pada tahun 2024, terdapat 3.889 lansia terlantar yang tercatat di Kabupaten Sumba Barat Daya dengan 52 persennya adalah perempuan. Jika dilihat menurut kecamatan, delapan dari sebelas kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki proporsi lansia perempuan terlantar yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki – laki. Secara umum, jumlah lansia perempuan lebih banyak menunjukkan harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Konsekuensinya adalah perempuan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk hidup sendiri di masa tua.

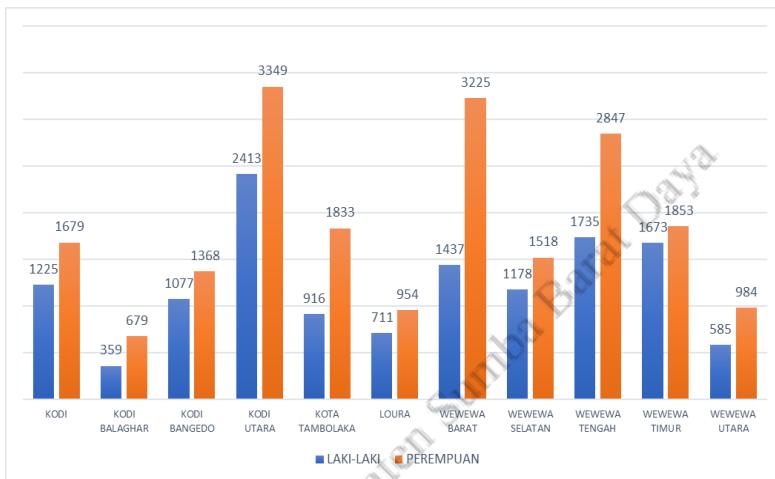
B. Bantuan Sosial Bagi Anak

Anak Penerima PKH (anak usia 0-18 tahun penerima PKH)

Berdasarkan Gambar 6.3, pada tahun 2024, tercatat sebanyak 35.628 anak usia 0-18 tahun yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH), yang terdiri dari 14.339 anak laki-laki dan 21.289 anak perempuan. Jumlah ini menunjukkan bahwa anak perempuan penerima PKH lebih banyak dari anak laki-laki dengan selisih 6.950 orang. Ketimpangan ini terlihat mencolok di beberapa kecamatan seperti Wewewa

Barat dan Kota Tambolaka dimana rasio penerima perempuan dibandingkan dengan laki-laki mencapai 2 banding 1.

Gambar 6.3. Jumlah Anak Penerima PKH menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya

Dari sisi wilayah, kecamatan Kodi Utara merupakan kecamatan dengan jumlah anak penerima PKH terbanyak yaitu sebanyak 5.762 orang, disusul oleh kecamatan Wewewa Barat sebanyak 4.662 orang dan kecamatan Wewewa Tengah sebanyak 4.582 orang. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah penerima terendah secara berturut-turut yaitu Kecamatan Kodi Balaghara sebanyak 1.038 orang, Kecamatan Wewewa Utara sebanyak 1.569 orang dan Kecamatan Loura sebanyak 1.665 orang. Jumlah ini kemungkinan dipengaruhi oleh jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, atau distribusi anak usia sekolah yang berbeda antar wilayah.

Bab VII.

Kegiatan Dan Praktek Baik Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar kewenangan Kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan berbagai upaya perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Barat Daya, diantaranya:

1. **Sosialisasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sosialisasi melindungi anak dari kekerasan seksual.**

Gambar 7.1 Sosialisasi Melindungi Anak dari Kekerasan dan Pembentukan Forum Anak Desa



Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan, dilaksanakan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk sanksi hukum, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Barat Daya melaksanakan sosialisasi secara luas dan berko laborasi dengan Yayasan Sumba Cendikia Bestari dan Save The Children. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Kodi Bangedo, Kodi Balaghar dan Kecamatan Wewewa Barat. Kegiatan ini mengusung isu perlindungan yaitu Stop Perkawinan Dini dan perkawinan paksa. Kegiatan ini melibatkan anak-anak sebagai narasumber dengan menyampaikan materi "Anak Tuh Di Sekolah bukan di pelaminan".

Selain itu, dilakukan juga pembentukan Forum Anak Desa yang dilaksanakan di 11 (sebelas) desa. Forum anak desa merupakan salah satu perwujudan pemenuhan hak anak yaitu hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak. Anak dapat menyuarakan pendapatnya dalam hal meminta agar hak-hak anak dipenuhi dan dilindungi serta keterlibatan anak dalam pembangunan.

2. **Peningkatan Kulaitas Ketahanan Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak melalui Upaya Pencegahan Stunting.**

Aksi konvergensi percepatan penurunan stunting dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Saat ini Kabupaten Sumba Barat Daya sedang bekerja keras dalam percepatan penurunan *stunting*. Oleh karena itu, DP3AP2KB sesuai tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam program peningkatan kualitas keluarga dengan pendekatan ketahanan keluarga. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengertian stunting dan pentingnya mencegah stunting. Maksud dan tujuan dari kegiatan Sosialisasi Pencegahan Stunting ini adalah agar masyarakat mampu memahami arti stunting dan agar masyarakat mampu mengambil langkah-langkah upaya pencegahan stunting dengan bimbingan dan arahan dari pemerintah.

Sasaran dari kegiatan ini meliputi orang tua yang memiliki anak stunting, ibu menyusui, ibu hamil dan calon pengantin. Kegiatan dilaksanakan di 15 (lima belas) desa yang berada di Kecamatan Kodi, Kodi Utara, Kodi Bangedo, Kodi Balaghar dan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya. Berikut lokasi kegiatan kelima belas desa tersebut beserta jadwal pelaksanaannya seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Lokasi Sosialisasi Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak melalui Upaya Pencegaha Stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya, 2024

No	Desa/Kecamatan	Hari / Tanggal	Jml Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Magho Linyo / Kodi Utara	Jumat, 8 November 2024	30 orang
2.	Noha / Kodi Utara	Sabtu, 9 November 2024	30 orang
3.	Lete Loko / Kodi Bangedo	Senin, 11 November 2024	30 orang
4.	Wallandimu / Kodi Bangedo	Selasa, 12 November 2024	30 orang
5.	Rada Loko / Kodi Bangedo	Rabu, 13 November 2024	30 orang
6.	Dinjo / Kodi Bangedo	Kamis, 14 November 2024	30 orang
7.	Waimaringi / Kodi Balaghar	Jumat, 15 November 2024	30 orang
8.	Lokotali / Kodi Balaghar	Sabtu, 16 November 2024	30 orang
9.	Waiha / Kodi Balaghar	Senin, 18 November 2024	30 orang
10	Tenateke / Wewewa Selatan	Selasa, 19 November 2024	30 orang
11	Homba Rande / Kodi	Rabu, 20 November 2024	30 orang
12	Koki / Kodi	Kamis, 21 November 2024	30 orang
13	Tanjung Karoso / Kodi	Jumat, 22 November 2024	30 orang
14	Ate Dalo / Kodi	Sabtu, 23 November 2024	30 orang
15	Kendu Wela / Kodi Utara	Senin, 25 November 2024	30 orang

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Barat Daya

Jumlah sasaran kegiatan sebanyak 450 orang.

Setelah sosialisasi dilaksanakan, DP3AP2KB memberikan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya kepada peserta masing-masing berupa beras 10 kg, Telur 1 rak dan Susu 1 dus.

Gambar 7.2 Sosialisasi Pencegahan Stunting dan Pemberian Sembako kepada Keluarga Beresiko Stunting



3. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Sebagai dasar untuk mewujudkan kesetaraan gender, secara nasional telah diterbitkan Instruksi presiden Nomor 9 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang implementasinya diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diterbitkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Kabupaten Sumba Barat Daya sendiri, diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Peraturan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, kelembagaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

Gambar 7.3 Advokasi Kebijakan dan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender, serta Pembentukan *Gender Vocal Point* di Perangkat Daerah



Sejauh ini implementasi Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah dan masyarakat belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan minimnya pemahaman ASN tentang pemahaman Pengarusutamaan Gender. Berdasarkan hal tersebut dilakukan sosialisasi tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam rangka pemahaman tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan, serta pembentukan *Gender Vocal Point* di beberapa Perangkat Daerah, yang bertujuan agar di dalam Perangkat Daerah tersebut mempunyai aparatur yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD – PPA)

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak ini adalah pelaksana teknis dari Dinas P3AP2KB Kabupaten Sumba Barat Daya. Oleh karena itu, kegiatan UPTD PPA bukan merupakan kegiatan perumusan kebijakan, melainkan kegiatan operasional

pemberian layanan perlindungan yang komprehensif, antara lain penyediaan jasa/layanan berupa:

- a.) Pengaduan Masyarakat; fungsi layanan publik berupa penerimaan pengaduan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum serta anak yang memerlukan perlindungan khusus dan atau masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana. Fungsi Pengaduan Masyarakat melaksanakan beberapa tugas layanan, yaitu Layanan Pengaduan Langsung, Layanan Pengaduan Tidak Langsung/Layanan Penjangkauan, dan Layanan Pengaduan Langsung Klien dengan kondisi medis atau semi kritis.
- b.) Penjangkauan Korban; terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dan memerlukan perlindungan khusus. Penjangkauan korban melalui kegiatan kunjungan rumah korban
- c.) Pengelolaan kasus; fungsi layanan pengelolaan kasus dengan melibatkan kemitraan para pihak hingga akhirnya kasus ditangani sampai tuntas. Fungsi layanan pengelolaan kasus mencakup berbagai aspek penting yang mendukung penanganan kasus hingga tuntas. Fungsi-fungsi tersebut meliputi pelaksanaan administrasi surat menyurat, pengolahan data, serta upaya preventif melalui publikasi di media cetak maupun elektronik. Selain itu, layanan ini juga mencakup pelaksanaan manajemen kasus atau bedah kasus, serta kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas penanganan yang telah dilakukan.
- d.) Pendampingan Korban; terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum serta anak yang memerlukan perlindungan khusus, adalah suatu Tindakan lanjutan dari pelaksanaan rekomendasi sebuah pengelolaan kasus pasca pengaduan, dimana UPTD PPA mendampingi klien sesuai hasil rekomendasi dan memantau perkembangannya. Layanan pendampingan dimaksud dapat meliputi:
 - Memberikan layanan pendampingan hukum; layanan pendampingan hukum diberikan kepada perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum serta anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan pertimbangan karena perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum kebanyakan kurang mengerti hukum, takut berhadapan dengan aparat penegak hukum sehingga perlu didampingi agar mereka berani berhadapan dengan proses hukum dan mengerti akan hak-haknya sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
 - Memberikan layanan pendampingan psikologis; layanan pendampingan psikologis diberikan kepada perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum serta anak yang memerlukan perlindungan khusus karena mereka mengalami trauma akibat khusus yang dialaminya sehingga tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan tidak memiliki kekuatan sehingga diperlukan pendampingan psikologis agar dapat melakukan proses selanjutnya.

- Memberikan layanan pendampingan bimbingan rohani; layanan pendampingan bimbingan rohani diberikan kepada perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum serta anak yang memerlukan perlindungan khusus agar mereka mampu menerima kasus yang menimpa dirinya sebagai musibah dan mengambil hikmah dari kejadian tersebut.
Dalam pelaksanaannya, fungsi pendampingan korban mencakup beberapa hal, yaitu pelaksanaan layanan pendampingan klien untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial, pelaksanaan pelayanan pendampingan hukum, serta pelayanan konsultasi hukum.
- e.) Fungsi pemulihan; Fungsi pemulihan ditujukan untuk membantu korban pulih secara menyeluruh, baik secara fisik maupun mental. Kegiatan yang termasuk dalam fungsi ini antara lain pelaksanaan layanan konseling oleh psikolog dan pemuka agama sebagai upaya pemulihan mental, pendampingan dalam mengakses layanan medis di fasilitas kesehatan, serta pelayanan trauma healing yang bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis klien pascakejadian traumatis.
- f.) Rumah Aman Sementara; Fungsi Layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum serta anak yang memerlukan perlindungan khusus di tempat penampungan sementara sehingga mereka bisa merasa aman karena dilindungi. Fungsi dari layanan penampungan sementara meliputi pelaksanaan pelayanan di rumah perlindungan bagi perempuan dan anak, pelaksanaan layanan pemulangan klien dari shelter, serta pelayanan mediasi bagi klien yang membutuhkan penyelesaian permasalahan secara damai dan terfasilitasi.

FOTO KEGIATAN UPTD PPA

Gambar 7.4 Pengaduan Langsung Ke kantor UPTD PPA



Gambar 7.5 Pendampingan Hukum



Gambar 7.6 Penampungan Sementara di Rumah Perlindungan, Bersama Lembaga Perlindungan Saksi & Korban (LPSK) dan Pendampingan Medis



Gambar 7.7 Pendampingan Psikolog oleh Psikolog dan Mediasi



Penutup

DP3AP2KB Kabupaten Sumba Barat Daya

Penutup

Publikasi *Profil Gender dan Anak Kabupaten Sumba Barat Daya 2025* memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kesetaraan gender dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, politik, hingga sosial. Data dan analisis yang disajikan menunjukkan bahwa telah terjadi berbagai kemajuan penting, namun tantangan dan ketimpangan masih perlu mendapat perhatian serius.

Secara umum, capaian *Indeks Pembangunan Gender (IPG)* menunjukkan arah yang positif, mencerminkan semakin setaranya akses perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan hidup layak. Namun demikian, *Indeks Ketimpangan Gender (IKG)* dan *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)* menunjukkan tren yang berlawanan: ketimpangan dalam partisipasi ekonomi dan politik masih cukup besar, serta keterwakilan perempuan dalam jabatan strategis dan lembaga pengambilan keputusan masih sangat terbatas.

Di bidang anak, publikasi ini juga menyoroti sejumlah tantangan krusial, seperti tingginya angka stunting, rendahnya kepemilikan akta kelahiran, serta tingginya kerentanan anak perempuan terhadap kekerasan seksual. Ketimpangan sosial-ekonomi juga tercermin dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, terutama di kelompok pendapatan terbawah dan wilayah pedesaan.

Upaya-upaya nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, seperti pembentukan Forum Anak Desa, penguatan UPTD PPA, serta sosialisasi pencegahan stunting dan pengarusutamaan gender, merupakan langkah penting yang perlu terus diperluas dan diperkuat. Sinergi antarperangkat daerah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Harapan kami, publikasi ini dapat menjadi rujukan penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, program, maupun intervensi berbasis bukti yang lebih responsif gender dan ramah anak. Dengan semangat kolaborasi, mari wujudkan Kabupaten Sumba Barat Daya yang lebih adil gender, ramah anak, dan berpihak pada kelompok rentan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Kelompok Penerima Bantuan/Hibah Ternak di kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024

No.	Jenis Ternak	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota Kelompok	Jumlah Anggota Kelompok Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kerbau	1	6	0
2	Sapi	9	120	27
3	Babi	7	91	41
4	Kambing	15	250	41
5	Ayam Potong (Broiler)	2	17	2
Total		34	484	111

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Barat Daya

Lampiran 2. Data Jumlah Peserta Pelatihan Home Industri menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024

No.	Jenis Pelatihan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menjahit	-	32	32 (2 Kelas)
2	Tata Boga	-	32	32 (2 Kelas)

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat Daya

Lampiran 3. Data Kelompok Tani Menurut Jenis Kelompok dan Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jenis Kelompok		Jumlah
		Kelompok Tani Umum	Kelompok Wanita Tani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Tambolaka	201	4	205
2	Loura	198	21	219
3	Kodi Utara	370	13	383
4	Kodi	216	13	229
5	Kodi Bangedo	156	5	161
6	Kodi Balaghar	161	1	162
7	Wewewa Selatan	237	18	255
8	Wewewa Barat	397	11	408
9	Wewewa Tengah	320	21	341
10	Wewewa Timur	341	12	353
11	Wewewa Utara	84	2	86
Total		2681	121	2802

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya

Lampiran 4. Data Jumlah Kelompok Nelayan (Tangkap) dan Anggota Kelompok menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024

Jumlah Kelompok Nelayan	Anggota Kelompok		Jumlah	Keterangan
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
131	3175	10	3185	1222 Orang sudah dikukuhkan

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya

BerAKHLAK 
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

PEREMPUAN BERDAYA ANAK TERLINDUNGI INDONESIA MAJU



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
SUMBA BARAT DAYA**

Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya, Kadula, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka